

LAKIP

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

TAHUN 2008

RENCANA STRATEGIS

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENETAPAN KINERJA

**PENGUKURAN
PENCAPAIAN SASARAN**

**PENGUKURAN
KINERJA KEGIATAN**

LAKIP TAHUN 2008

KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2009

KATA PENGANTAR

Tahun 2008 merupakan tahun keempat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian Negara PPN/Bappenas) sesuai dengan visi dan misi serta tujuan organisasi di dalam rencana strategis (Renstra) periode 2005-2009. Selama tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas terus meningkatkan perannya dalam mengkoordinasikan perencanaan pembangunan nasional dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana disadari, perkembangan perubahan lingkungan baik global, nasional maupun daerah menuntut adanya peran Kementerian Negara PPN/Bappenas yang semakin nyata dan akuntabel. Hal ini diupayakan tercermin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008, yang dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan strategis baik dalam perencanaan pembangunan nasional maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan penugasan dari Presiden.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tahun keempat pelaksanaan Renstra 2005-2009 berisi berbagai kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Pada tahun 2008, fokus kegiatan ditekankan pada beberapa kegiatan strategis, antara lain: 1) pelaksanaan telaah dan kajian (*background study*) di berbagai bidang pembangunan sebagai salah satu bahan utama untuk penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 pada tahun 2009 (tahun kelima pelaksanaan Renstra 2005-2009); 2) evaluasi pelaksanaan tiga tahun RPJMN 2005-2009 yang juga merupakan salah satu masukan penting untuk penyusunan RPJMN 2010-2014; dan 3) koordinasi strategis pembangunan lainnya yang bersifat lintas sektoral dan lintas daerah/wilayah, seperti koordinasi pelaksanaan bantuan (*grant*) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, koordinasi penyusunan Jakarta *Commitment* dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan koordinasi pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) serta koordinasi-koordinasi pembangunan lainnya yang membutuhkan peran Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.

Seiring dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka pada tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi serta pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dalam Rencana Kinerja Tahun 2008 yang telah ditetapkan. Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menetapkan beberapa target pencapaian indikator kinerja baik indikator kinerja kegiatan maupun indikator sasaran dari kegiatan seluruh unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Pada umumnya, kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 telah berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut merupakan bagian utuh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara PPN/Bappenas (LAKIP) Tahun 2008 ini.

Semoga laporan tersebut dapat memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008.

Jakarta, Maret 2009

MENTERI NEGARA PPN/KEPALA BAPPENAS

PASKAH SUZETTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.	Struktur Organisasi	4
1.4.	Sumber Daya Manusia	7
1.5.	Sumber Pendanaan	8
BAB II	RENCANA STRATEGIS	11
2.1.	Rencana Strategis Tahun 2005 - 2009	11
2.2.	Rencana Kinerja Tahun 2008	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1.	Akuntabilitas Kinerja Kegiatan dan Sasaran	27
A.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	27
A.1.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	27
A.2.	Pengukuran Pencapaian Sasaran	63
B.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	65
B.1.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	65
B.2.	Pengukuran Pencapaian Sasaran	76
C.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	78
C.1.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	78
C.2.	Pengukuran Pencapaian Sasaran	79
D.	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	80
D.1.	Pengukuran Kinerja Kegiatan	81
D.2.	Pengukuran Pencapaian Sasaran	83
E.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	83
E.1	Pengukuran Kinerja Kegiatan	84
E.2	Pengukuran Pencapaian Sasaran	89
3.2	Akuntabilitas Kinerja Keuangan	90
BAB IV	PENUTUP	93
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Rencana Strategis Tahun 2005 – 2009 Kementerian Negara PPN/
Bappenas
- LAMPIRAN 2 : Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2008 Kementerian Negara PPN/
Bappenas
- LAMPIRAN 3 : Penetapan Kinerja Tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas
- LAMPIRAN 4 : Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2008 Kementerian Negara PPN/
Bappenas
- LAMPIRAN 5 : Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2008 Kementerian Negara PPN/
Bappenas
- BAGAN 1 : Struktur Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas
- GAMBAR 1 : Road Map Penerapan Manajemen Kinerja Kementerian Negara PPN/
Bappenas

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Negara PPN/Bappenas merupakan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam melakukan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Seluruh pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) periode 2005-2009. Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan. Tahun 2008 merupakan tahun keempat pelaksanaan Renstra Periode 2005-2009. Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra periode 2005-2009 disebutkan 2 tujuan yang akan dicapai, 1) meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan RPJMN 2004-2009, 2) memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kedua tujuan tersebut berupaya dicapai melalui program dan kegiatan-kegiatan pada masing-masing program.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2008 program-program yang digunakan adalah sama, yaitu 5 program sebagai berikut 1) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur, 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, 4) Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik; dan 5) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Pelaksanaan kelima program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan visi dan misi Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menetapkan rencana kegiatan dengan indikator dan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

Tabel 1
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET/ SASARAN	REALISASI	%
1	Jumlah Rancangan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional: 1. Rancangan RKP Tahun 2009 2. Konsep awal/ sementara mengenai Garis-garis besar rancangan RPJMN 2010-2014.	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	100% 100%
2	Jumlah Pengkajian Bidang Pembangunan - Backgroud study untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/ sektor sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014. - Kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/ bidang, lintas bidang/ sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	2 Dokumen yang berisi berbagai sector/ bidang pembangunan	2 Dokumen yang berisi berbagai sector/ bidang pembangunan	100%
3	Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pendanaan - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat (Rakorpus) - Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik Nasional dan Propinsi	1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan	1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan	100% 100%
4	Jumlah Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional - Evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Evaluasi RKP 2008	1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan (berisi evaluasi berbagai sector/ bidang pembangunan)	1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan (berisi evaluasi berbagai sector/ bidang pembangunan)	100% 100%
5.	Jumlah Koordinasi Strategis lainnya yang bersifat sektoral/ bidang dan daerah serta lintas sektoral/ bidang dan lintas wilayah	16 dokumen	16 dokumen	100 %
6.	Jumlah upaya peningkatan kualitas SDM aparatur baik di pusat maupun daerah	2 dokumen	2 dokumen	100 %
7.	Jumlah upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana	4 dokumen	4 dokumen	100 %
8.	Jumlah kegiatan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja keuangan dan kelembagaan	6 dokumen	6 dokumen	100 %
9.	Pengembangan manajemen kinerja meliputi penetapan IKU, KPI Lembaga/unit kerja/ pegawai/ uraian jabatan, SOP dsb	1 Dokumen	1 Dokumen	70%

Seluruh pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut di atas telah dilaksanakan dengan baik dan berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaan tersebut masih terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana pembangunan (khususnya RKP) yang telah ditetapkan seringkali menghadapi perubahan lingkungan strategis, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan krisis keuangan global, dan perubahan atau dinamika ekonomi global lainnya. Konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian target-target dalam dokumen rencana pembangunan (RPJM dan RKP). Misalnya, pada tahun 2008 terjadi kenaikan harga BBM sehingga mengakibatkan alokasi anggaran K/L yang telah ditetapkan harus disesuaikan kembali (direvisi, pengurangan 10%) dengan kondisi keuangan negara pada saat itu.
- 2) Masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah melalui APBN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJP, RPJM dan RKP.
- 3) Masih belum selesainya pedoman reformasi birokrasi yang solid dan komprehensif sehingga belum dapat dijadikan acuan sepenuhnya dalam pengembangan manajemen kinerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Melihat permasalahan atau hambatan pokok tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta didalam pembiayaan pembangunan antara lain untuk kelompok barang-barang publik (*public goods*) yang memerlukan investasi besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Hal tersebut sudah dilakukan antara pemerintah dan swasta dengan menyusun rencana usulan pembangunan infrastruktur berskala besar yang di terbitkan melalui *Public Private Partnersip* (PPP) Book,

serta penyusunan konsep kebijakan PPP dan membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI).

- 3) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian Negara PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional dan mengambil langkah-langkah antisipatif.
- 4) Kementerian Negara PPN/Bappenas terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga (LAKIP K/L). LAKIP memuat ringkasan keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan (kinerja kegiatan) dan hasil (*outcome*) yang dicapai dari masing-masing program (kinerja hasil) sesuai dengan dokumen pelaksanaan APBN/APBD yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti amanat Inpres tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas menyusun kembali laporan pelaksanaan program dan kegiatannya dalam bentuk LAKIP Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2008. LAKIP Tahun 2008 ini merupakan laporan pelaksanaan tahun ke-4 (keempat) dari Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009. Penyusunan LAKIP tahun ke-5 (kelima) atau tahun terakhir adalah pada tahun 2009 yang akan dilaporkan pada awal tahun 2010.

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) di bidang perencanaan, yaitu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana tersebut, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Presiden. Semua kegiatan tersebut merupakan kegiatan utama dan strategis yang berdampak pada kinerja pembangunan nasional. Berbeda dengan kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki tugas dengan bidang yang nyata, mudah dilihat dan diukur kinerjanya (*tangible products*), kegiatan utama atau strategis dari Kementerian Negara PPN/Bappenas cenderung lebih bersifat tidak nyata, tidak terlihat (*intangible product*) dan sulit diukur baik keluarannya (*output*) maupun hasilnya (*outcome*). Sebagai contoh, keluaran (*ouput*) utama Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah dokumen konsep/rancangan rencana pembangunan (Rancangan RKP, Rancangan RPJM, Rancangan

RPJP), dan akan berubah menjadi hasil (*outcome*) setelah semua rancangan tersebut dibahas dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan baik oleh pemerintah atau oleh Pemerintah dan DPR, menjadi RKP, RPJM dan RPJP. Selanjutnya, setelah rencana pembangunan tersebut dilaksanakan dan terlihat kinerjanya, maka hasil langsung dan ataupun tidak langsung dari pelaksanaan tersebut dapat dianggap sebagai dampak (*impact*).

Beberapa kegiatan utama dan strategis Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 antara lain: 1) pelaksanaan telaah dan kajian latar belakang (*background study*) di berbagai sektor/bidang, untuk menjadi bahan atau masukan utama dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 yang akan disusun pada tahun 2009 (tahun kelima pelaksanaan Renstra 2005-2009); 2) evaluasi pelaksanaan RPJM 2005-2009 yang akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJM 2010-2014; 3) peningkatan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, sesuai penugasan Presiden, sebagai persiapan berakhirnya tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada bulan April 2009; 4) kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk merespon dampak dari perubahan iklim (*climate change*) antara lain melalui pertemuan di Bali pada bulan Mei 2008; 5) bersama-sama dengan Departemen Keuangan melakukan pendekatan dan negosiasi dengan para lembaga donor baik bilateral maupun multilateral untuk menyusun Kesepakatan Jakarta (*Jakarta Commitment*) yang dimaksudkan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat mengatur sepenuhnya penggunaan pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) di Indonesia, sehingga pemanfaatan PHLN dapat menjadi lebih optimal (*GOI driven* dan bukan *donor driven*). Jakarta Commitment ini ditandatangani pada awal tahun 2009 di Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas; 6) pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (LKPP) yang embrionya berasal dari Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang merupakan unit kerja eselon II di Kementerian Negara PPN/Bappenas; 7) Penanganan terhadap dampak dari kenaikan BBM dan krisis global, dan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT); 8) pembinaan dan pendidikan para perencana di pusat (Bappenas dan K/L lainnya) dan daerah (Bappeda) melalui diklat gelar (S-1 dan S2) di dalam dan di luar negeri, diklat non gelar (fungsional) dan upaya pembinaan lainnya bagi JFP; 8) koordinasi bantuan (hibah) para lembaga donor/mitra untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009; dimana Bappenas menjadi koordinator mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat mengelola bantuan hibah (*grant*) dari lembaga mitra; 9)

Evaluasi atas pelaksanaan 3 tahun RPJM 2005-2009 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007; 10) Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (2005-2007) bersama-sama dengan perguruan tinggi; 11) Evaluasi pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK); 12) Dukungan pelaksanaan sekretariat dan koordinasi penyiapan substansi Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional; 13) pengembangan *Good Governance Index* (GGI) yang difokuskan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen di instansi pusat dan daerah; serta 14) persiapan dan koordinasi pelaksanaan *United Nation Conference for Anti Corruption* (UNCAC) di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung berbagai pelaksanaan tugas, Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan pengembangan manajemen kinerja, yang mencakup penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, termasuk penyusunan indikator kinerja utama atau *key performance indicator* sesuai peraturan yang berlaku, dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 101 dan 103 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Keppres Nomor 2 dan 3 Tahun 2002, dan diubah kembali melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 dan 12 Tahun 2005, Kementerian Negara PPN/Bappenas mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan pembangunan nasional, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Tugas tersebut dijabarkan ke dalam beberapa fungsi, sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional.
- 3) Koordinasi dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 4) Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan bersama-sama dengan Departemen Keuangan.
- 5) Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait.
- 6) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas.

- 7) Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- 8) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 9) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
- 10) Tugas-tugas lainnya dari Presiden.

1.3. Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas, telah disusun struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 005/M.PPN/ 09/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas terdiri dari unit kerja eselon I, II, III dan IV. Permen ini sudah 2 kali mengalami perubahan dalam kabinet persatuan Indonesia, disebabkan oleh dinamika organisasi dan pergantian Pimpinan Lembaga.

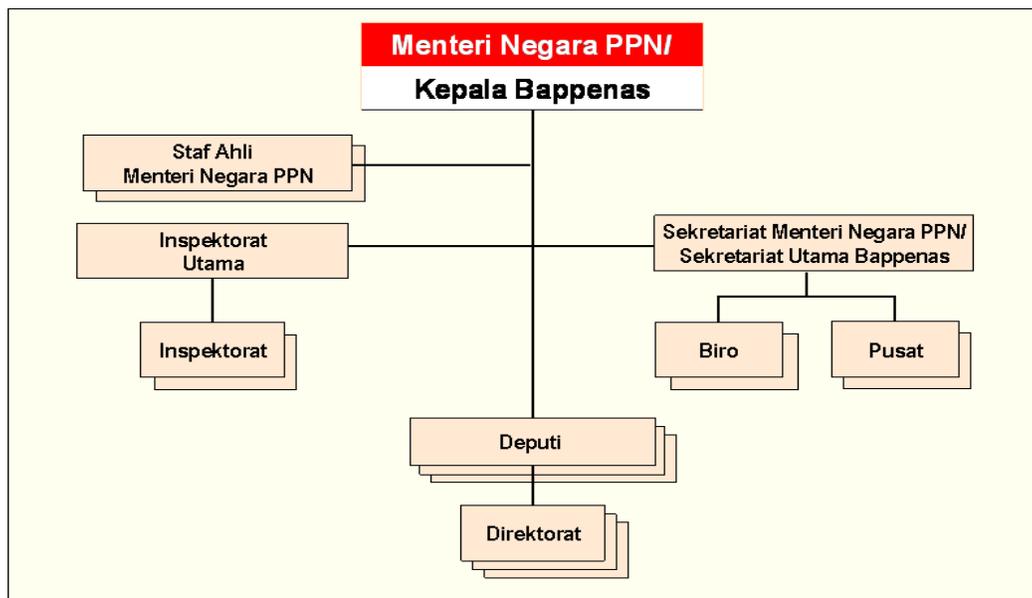
Organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas terdiri dari 16 unit kerja eselon I meliputi Sekretariat Kementerian Negara PPN/Sekretariat Utama Bappenas, 9 (sembilan) unit kerja Kedeputan, 1 (satu) unit kerja Inspektorat Utama, dan 5 (lima) unit kerja Staf Ahli Kementerian Negara PPN. Sedangkan unit kerja eselon II terdiri dari 51 unit kerja eselon II, meliputi 5 (lima) Biro, 3 (tiga) Pusat, 41 direktorat, dan 2 (dua) inspektorat. Kemudian, mempunyai unit kerja eselon III terdiri dari: 17 bagian, 138 sub direktorat, serta 11 bidang. Unit kerja eselon IV sebanyak 56 unit meliputi sub bagian.

Sejak tahun 2004, Unit kerja eselon IV di Kedeputan telah ditiadakan dan diganti dengan jabatan struktur fungsional perencana (JFP). Sedangkan di Sekretariat Kementerian Negara PPN/Sekretariat Utama Bappenas, Tata Usaha Kedeputan, dan Inspektorat tetap memiliki unit kerja eselon IV. Pertimbangan penghapusan jabatan eselon IV di Kedeputan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang perencanaan baik perencanaan makro, sektoral, dan regional. Diharapkan dengan penghapusan jabatan eselon IV tersebut, akan mendorong

peningkatan kinerja para pegawai di bidang perencanaan pembangunan nasional khususnya pegawai yang menjabat fungsional perencana.

Secara garis besar struktur organisasi Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Struktur organisasi di atas dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas khususnya dalam melaksanakan Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009, dan dimungkinkan adanya penyempurnaan sebagai antisipasi terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional. Secara singkat uraian tugas pokok dan fungsi kedeputian pembangunan adalah sebagai berikut:

1) Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Menangani perencanaan bidang pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan yang meliputi bidang kesehatan, gizi masyarakat, agama, pendidikan, kependudukan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan sumber daya manusia dan kebudayaan.

2) Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Menangani perencanaan bidang pembangunan politik, komunikasi, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, pertahanan, dan keamanan. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

3) Kedeputian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

Menangani perencanaan bidang pembangunan yang meliputi penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, pengembangan kesempatan kesempatan kerja, pemberdayaan koperasi, usaha kecil menengah, serta perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah.

4) Kedeputian Bidang Ekonomi

Menangani perencanaan bidang pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan makro, keuangan negara, jasa keuangan, analisis moneter, perdagangan, investasi, kerjasama ekonomi internasional, industri, iptek, dan BUMN. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan ekonomi.

5) Kedeputian Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Menangani perencanaan bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang meliputi pangan, pertanian, kehutanan, konservasi sumber daya air, kelautan, perikanan, sumber daya mineral, pertambangan, dan lingkungan hidup. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas untuk mencapai misi dan program kerja Bappenas khususnya di bidang perencanaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

6) Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana

Menangani perencanaan bidang pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi pengairan, irigasi, transportasi, permukiman, perumahan, energi, telekomunikasi, informatika, dan pengembangan kelembagaan prasarana publik. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan sarana dan prasarana.

7) Kedeputian Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Menangani perencanaan bidang pengembangan regional dan otonomi daerah yang meliputi pengembangan wilayah, kawasan khusus dan daerah tertinggal, otonomi daerah, perkotaan, pedesaan, tata ruang, dan pertanahan. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan pengembangan regional dan otonomi daerah.

8) Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan

Menangani perencanaan bidang pendanaan pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan pembangunan, pendanaan luar negeri bilateral, pendanaan luar negeri multilateral, pendayagunaan pendanaan pembangunan. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang perencanaan pendanaan pembangunan.

9) Kedeputian Bidang Evaluasi Kinerja pembangunan

Menangani bidang evaluasi kinerja pembangunan melalui, melakukan pengkajian atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, serta menyusun pelaporan evaluasi kinerja pembangunan nasional secara maupun regional sektoral. Kedeputian ini diharapkan dapat mengemban tugas Bappenas khususnya di bidang evaluasi kinerja pembangunan.

1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas relatif tidak banyak apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Pebruari 2009, kekuatan sumber daya manusia Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah sebanyak 899 orang yang terdiri dari 746 orang pegawai organik dan 61 orang pegawai non organik. Dari jumlah tersebut, terdapat 225 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural dan sisanya sebanyak 582 orang merupakan staf. Tingkat pendidikan yang dimiliki pegawai Bappenas (data per Pebruari 2009) adalah 72 orang S3 (8,01%), 277 orang S2 (30,81%), 218 orang S1 (24,25%), 29 orang Sarjana Muda/D3 (3,23%), 245 orang SLTA (27,25%), dan 58 orang SLTP/ SD (6,45%) sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2
PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2008
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN						TOTAL
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP/SD	
IV	66	169	15	-	-	-	250
III	6	108	194	12	47	-	367
II	-	-	9	17	195	51	272
I	-	-	-	-	3	7	10
Jumlah	72	277	218	29	245	58	899
Persentase	8,02%	30,81%	24,28%	3,23%	27,25%	6,45%	100%

Sumber : Diolah dari Data Biro Sumber Daya Manusia, Pebruari 2009

1.5. Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 601.374 miliar meliputi anggaran rupiah murni sebesar Rp. 331.652 miliar (termasuk gaji PNS) dan anggaran PHLN sebesar Rp. 269.721 miliar yang diperuntukkan bagi pelaksanaan 7 (tujuh) program pembangunan (Lihat Tabel 3).

Tabel 3
PAGU ANGGARAN TAHUN 2008
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
MENURUT PROGRAM

(dalam juta rupiah)

NO	PROGRAM	PAGU		
		RUPIAH MURNI	PHLN	JUMLAH
A.	Anggaran 55	284.185,556	209.602,104	493.787,660
1.	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	154.386,379	136.693,498	291.079,877
		53%	47%	100%
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	35.017,464	72.908,606	107.926,070
		32%	68%	100%
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	27.479,736	-	27.479,736
		100%	-	100%
4.	Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik	63.801,957	-	63.801,957
		100%	-	100%
5.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	3.500,020	-	3.500,020
		100%	-	100%
B.	Anggaran 69	47.467,147	60.119,713	107.586,860
6.	Program Pemberdayaan Masyarakat	18.894,696	60.119,713	79.014,409
		24%	76%	100%
7.	Program Pembiayaan Lain-Lain	28.572,451	-	28.572,451
		100%	-	100%
Jumlah		331.652,703	269.721,817	601.374,520
		55%	45%	100%

Sumber : Diolah dari Laporan Pemantauan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Desember 2008.

Sebenarnya jumlah anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas pada setiap tahunnya tidak semuanya digunakan untuk kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas di bidang perencanaan termasuk evaluasi kinerja pembangunan. Sekitar 50% dari anggaran tersebut dipakai untuk melaksanakan kegiatan lainnya sesuai penugasan dari Presiden/Pemerintah, antara lain koordinasi kegiatan rekonstruksi serta rehabilitasi Aceh dan Nias yang dilaksanakan Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD dan Nias yang akan berakhir pada bulan April

2009; pengembangan SDM perencana di Kementerian Negara PPN/Bappenas melalui diklat gelar dan non gelar; persiapan pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), kebijakan kemitraan pemerintah dan swasta (*public-private partnership*) dalam pembiayaan pembangunan; bersama-sama instansi lain dalam penanganan kemiskinan, dampak perubahan iklim (*climate change*), koordinasi bantuan (hibah) luar negeri dari lembaga donor untuk mendukung Pemilu 2009, dan koordinator (*Investment Loan Management Unit*) dalam melaksanakan *State Audit Reform-Sectoral Development Program/Project* yang mengkoordinasikan berbagai lembaga di pusat dan daerah (Depkeu, BPK, BPKP, Depdiknas, Depdagri, Sekretariat DPR dan Bawasda) antara lain dalam membangun audit keuangan dan audit kinerja melalui pembentukan program studi S1- dan S-2 bidang akuntansi pemerintahan dan pemberian beasiswa bagi para audirtor untuk mengikuti pendidikan S2 dan S2 tersebut di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta. Khusus untuk program-program yang dibiayai dengan anggaran 69 (Depkeu), perlu dijelaskan bahwa semua anggaran 69 tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan nasional pemberdayaan masyarakat khususnya di daerah dan tidak untuk kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan dan kegiatan-kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Semua penugasan tersebut membuat beban kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai berat, tidak hanya pada tanggung jawab terhadap pencapaian *output* dan *outcome* kegiatannya, tetapi juga akuntabilitas dalam pengelolaan anggarannya. Selain itu, penugasan-penugasan menuntut SDM Bappenas untuk mampu membagi waktu dalam melaksanakan tugas di bidang perencanaan dan di bidang-bidang lainnya tersebut diatas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis Tahun 2005 – 2009

1. Visi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Rentsra 2005-2009. Visi tersebut adalah:

“Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”.

Sebagai lembaga perencana, Kementerian Negara PPN/Bappenas dituntut untuk dapat menghasilkan produk-produk perencanaan yang dapat diandalkan dalam arti dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan bangsa, dan dapat diimplementasikan serta mampu mengantisipasi tantangan global. Untuk itu, Kementerian Negara PPN/Bappenas harus menjadi institusi perencana yang **handal**, dalam arti memiliki kemampuan tinggi dan siap melaksanakan berbagai tugas yang dibebankan kepadanya, dengan baik dan akuntabel. Kemudian, menjadi lembaga yang **kredibel** dalam arti dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kementerian Negara PPN/Bappenas harus mendasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, Kementerian Negara PPN/Bappenas harus secara **proaktif** mampu dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang handal, kredibel dan proaktif tersebut harus tercermin dan mewarnai pelaksanaan berbagai kegiatan seperti analisis kebijakan dan atau kajian pembangunan nasional, perencanaan, penganggaran serta penanganan masalah mendesak (peran pengambil keputusan, dan sebagai *think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan (peran sebagai koordinator dan

administrator). Uraian lebih rinci mengenai Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas Tahun 2005 – 2009 disampaikan pada Lampiran 2.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

<p style="text-align: center;">Tabel 4 MISI TAHUN 2005 - 2009 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>	
NO	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas rancangan kebijakan dan penentuan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.
2	Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan <i>stakeholders</i> untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional.
3	Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya.
4	Mengembangkan kapasitas, potensi, dan kompetensi nasional dalam perencanaan pembangunan secara berkelanjutan.

3. Tujuan

Kemudian, misi Kementerian Negara PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2005-2009, sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">Tabel 5 TUJUAN TAHUN 2005 - 2009 KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>	
NO	TUJUAN
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
2	Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.

4. Sasaran

Selanjutnya, berdasarkan tujuan-tujuan di atas, ditetapkan beberapa sasaran strategis, yang dapat diukur dengan indikator-indikatornya masing-masing sebagaimana tercermin dalam Tabel 6, 7, 8, 9, dan 10 dibawah ini.

Tabel 6 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggarannya	Persentase rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan nasional
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden

Tabel 7 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANA APARATUR		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional	Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di Kementerian Negara PPN/Bappenas
		Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana di instansi lainnya, pusat dan daerah

Tabel 8 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sumber daya manusia perencana	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan aset fasilitas kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas

Tabel 9 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan pelayanan umum melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja	Persentase peningkatan pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas
		Persentase kualitas pembinaan pengelolaan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas

Tabel 10 SASARAN TAHUN 2005 - 2009 PROGRAM PENINGKATAN PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA		
NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Meyelenggarakan pengawasan aparatur dalam menunjang peran-peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	Berkurangnya temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan dan kinerja

4. Kebijakan dan Program

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas, dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program, seperti tampak dalam Tabel 11. Kebijakan disusun berdasarkan pemikiran dan kebutuhan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Sedangkan program yang digunakan adalah sesuai dengan program yang tersedia di dalam sistem penganggaran – APBN dan bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh semua kementerian dan lembaga (K/L). Idealnya, Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki program yang spesifik dan sesuai tupoksinya yaitu perencanaan pembangunan nasional, sehingga sangat relevan untuk mengukur kinerja program dan kegiatannya serta sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja. Direncanakan dalam RPJM 2010-2014, setiap K/L (sebagian sudah) memiliki program-program yang relevan dengan bidang tugasnya sehingga memudahkan dalam pengukuran, evaluasi dan pelaporan kinerjanya. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dapat dilakukan lebih baik.

Tabel 11
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2005 – 2009
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan, dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
2	Peningkatan kualitas pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sektor pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan	
3	Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada stakeholder dan masyarakat	
4	Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan public, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya	
5	Penataan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, <i>think tank</i> , koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	
6	Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam <i>domain of expertise (hardskills</i> maupun <i>domain of competencies (soft skills)</i>	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
7	Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistik, hasil-hasil litbang, peta wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
8	Penataan organisasi Bappenas sebagai "organization capital" yang melalui pengembangan Budaya Organisasi, yang dijabarkan dalam nilai inti budaya, serta kode etik profesi perencana pembangunan	Penerapan Pemerintahan yang Baik
9	Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakkan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

5. Program dan Kegiatan

Selanjutnya, kelima program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang relevan, sebagaimana tercermin dalam tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 12 PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
KEGIATAN 1	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan kajian tentang perencanaan pembangunan nasional - Kegiatan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional
KEGIATAN 2	Penyempurnaan tata laksana dan hubungan kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan kementerian/lembaga di pusat dan lembaga perencanaan di daerah, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan koordinasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan nasional - Kegiatan pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional
KEGIATAN 3	Penciptaan sistem administrasi pendukung dan basis data perencanaan pembangunan nasional yang efektif <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penyusunan dan pengembangan sistem basis data perencanaan pembangunan nasional

Tabel 13 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung proses, pendidikan, pembinaan, dan pelatihan sumber daya manusia perencana meliputi :	
KEGIATAN 1	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di Kementerian Negara PPN/Bappenas
KEGIATAN 2	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana di instansi pemerintah pusat dan daerah
KEGIATAN 3	Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia perencana di Kementerian Negara PPN/Bappenas
KEGIATAN 4	Peningkatan pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah pusat dan daerah

Tabel 14 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	
Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan meliputi :	
KEGIATAN 1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan
KEGIATAN 2	Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional

<p style="text-align: center;">Tabel 15 PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>	
<p>Kegiatan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi :</p>	
KEGIATAN 1	<p>Pengelolaan pelayanan umum (administrasi keuangan, dan sebagainya) dalam rangka peningkatan kinerja lembaga dan pegawai</p>
KEGIATAN 2	<p>Pengelolaan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas</p>

<p style="text-align: center;">Tabel 16 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL</p>	
<p>Kegiatan Koordinasi dalam rangka Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan, Tindaklanjut Temuan dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan, meliputi :</p>	
KEGIATAN 1	<p>Pengawasan atas pengelolaan kinerja dan keuangan Kementerian Negara PPN/Bappenas</p>
KEGIATAN 2	<p>Pemeriksaan dan tindaklanjut atas hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas</p>
KEGIATAN 3	<p>Pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian internal pemerintah</p>

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2008

Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas merupakan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahun, dan dijabarkan ke dalam dan dilaksanakan dengan rencana tahunan yang disebut Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT berisi rencana kinerja kegiatan dan rencana kinerja sasaran beserta indikator-indikatornya. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Negara PPN/Bappenas secara lebih rinci terlihat pada Tabel 17, 19, 21, 23, dan 25, serta Rencana Kinerja Sasaran secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 18, 20, 22, 24, dan 26.

Tabel 17
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi : 1. RKP (2009) 2. Konsep awal/ sementara mengenai garis-garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	Jumlah dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional : 1. Dokumen Rancangan RKP (2009) 2. Dokumen Konsep awal/ sementara mengenai garis-garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	2 dokumen
2	Pengkajian Bidang Pembangunan - <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/ sektor sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014). - Kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/ bidang, lintas bidang/ sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	Jumlah Dokumen Pengkajian Bidang Pembangunan - Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/ elaan dan kajian bidang pem-bangunan (berbagai bidang/ sektor sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014 - Dokumen kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/ bidang, lintas bidang/ sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	1 dokumen berisi berbagai sector/ bidang pembangunan 1 dokumen berisi berbagai sector/ bidang pembangunan
3	Koordinasi startegis perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	1 dokumen 1 dokumen
4	Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Evaluasi RKP 2008	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Dokumen evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Laporan evaluasi RKP 2008	1 dokumen 1 dokumen
5.	Koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/ Pemerintah, antara lain:	Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/ Pemerintah, antara lain:	
	a. Koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project</i> (STAR-SDP)	Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project</i> (STAR SDP)	1 dokumen
	b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen
	c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen

Tabel 17
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
	d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah.	Dokumen Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen
	e. Koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multiteral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	Dokumen koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multiteral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	1 dokumen
	f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen
	g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen
	h. Koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Dokumen koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 dokumen
	i. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen
	j. Koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	Dokumen koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	1 dokumen
	k. Koordinasi penataan ruang	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen
	l. Koordinasi peningkatan upaya mit-gasi dan pengurangan resiko bencana alam	Dokumen koordinasi peningkatan upaya mit-gasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen
	m. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen
	n. Pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	Dokumen pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	1 dokumen

Tabel 18
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	% rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2009 dan konsep RPJMN 2010-2014	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	% peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden	90 %

Tabel 19
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	457 orang
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	1460 orang
3	Penyusunan dokumen pengaturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Indonesia	Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia	7 dokumen
4	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan 	39 orang 625 orang 59 orang 40 orang

Tabel 20
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah.	% alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3.	80 %
		% alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah.	80 %
		% alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %
		% alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %
2	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Negara PPN/ Bappenas.	% perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %

Tabel 20
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
		% pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %
		% penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %

Tabel 21
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	90 %
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70 %
3	Menyediakan kelengkapan data/informasi yang diperlukan	% Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %

Tabel 22
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	% sarana dan prasaran serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang tersedia dengan baik	70%
2	Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik

Tabel 23
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100 %
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pelayanan umum untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	100 %
3	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas	100 %

Tabel 24
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	% peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas	90 %

Tabel 25
PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET
1	Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja Tupoksi Kelembagaan yang Dihasilkan pada Tahun 2008.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008.	8 LHP
2	Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.	Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan.	40%
3	Pengembangan atau Penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen	Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen	4 Masukan
4	Identifikasi Peraturan yang Bermasalah dalam Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Tupoksi Kelembagaan.	Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan.	6 buah
5	Reviu atas Laporan Keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	4 Lap
6	Seminar Ketaatan	Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan	6 Kali

Tabel 26
PENETAPAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal	40 %
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2008 dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2008 sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Perhatian utama dalam kegiatan tahun 2008 ditekankan pada 2 kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses dan keberhasilan pembangunan, yaitu penyusunan Rancangan RKP 2010 dan *background study* untuk seluruh bidang pembangunan nasional sebagai bahan masukan utama untuk penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Hal ini mengingat kedua kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses yang besar yaitu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang posisinya sangat penting dan harus ada untuk proses pembangunan nasional di berbagai bidang.

Namun demikian, hal itu tidak berarti kegiatan lainnya tidak penting dan tidak strategis. Kegiatan lainnya tetap penting dan strategis karena berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan pembangunan nasional. Kegiatan-kegiatan tersebut, antara lain: evaluasi pelaksanaan 3 tahun RPJM 2005-2009; koordinasi strategis di berbagai bidang sesuai penugasan Presiden seperti koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias mengingat BRR akan berakhir pada April 2009; koordinasi program dan kegiatan untuk turut menangani perubahan iklim *climate change*; dukungan koordinasi kegiatan dan substansi untuk Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN); pembentukan Lembaga Kebijakan Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang embrionya berasal dari unit kerja eselon II di Kementerian Negara PPN/Bappenas, pengembangan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan (*public private partnership*); dan sebagainya.

Berikut ini penjelasan mengenai pelaksanaan masing-masing program yang mencakup uraian kegiatan utama, hambatan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

3.1. AKUNTABILITAS KINERJA KEGIATAN DAN SASARAN

A. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan merupakan program yang berisi kegiatan-kegiatan utama Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan di berbagai bidang. Karena itu, jumlah anggaran untuk program ini relatif besar dan digunakan oleh sebagian besar unit kerja di Bappenas. Sebenarnya program ini merupakan program generik, untuk semua kementerian dan lembaga (K/L), dan tidak sesuai dengan bidang perencanaan. Namun karena dalam sistem penganggaran yang berlaku hingga saat ini belum ada program yang khusus untuk lembaga perencanaan, maka Bappenas menggunakan program generik tersebut. Untuk RPJM 2010-2014, Bappenas dan Depkeu sedang menyusun program-program yang spesifik untuk setiap K/L agar sesuai dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

A.1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 telah melakukan berbagai kegiatan strategis yang berpengaruh terhadap kelancaran pembangunan bangsa dan negara, baik yang bersifat tupoksi perencanaan pembangunan maupun penugasan non perencanaan dari Presiden. Untuk itu, dapat dijelaskan hasil pengukuran pencapaian pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, meliputi : 1. RKP (2009) 2. Konsep awal/sementara mengenai garis-garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	Jumlah dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Nasional : 1. Dokumen Rancangan RKP (2009) 2. Dokumen Konsep awal/sementara mengenai garis-garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun, dan dilanjutkan pada tahun 2009)	2 dokumen	2 dokumen	100 %

Tabel 27
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
2	Pengkajian Bidang Pembangunan - <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/telaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014). - Kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	Jumlah Dokumen Pengkajian Bidang Pembangunan			
		- Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/elaahan dan kajian bidang pembangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014) - Dokumen kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	100 %
3	Koordinasi startegis perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi : - Koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus) - Musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi :			
		- Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
		- Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi -	1 dokumen	1 dokumen	100 %
4	Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi : - Evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Evaluasi RKP 2008	Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi :			
		- Dokumen evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Laporan evaluasi RKP 2008	1 dokumen	1 dokumen	100 %
5.	Koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:	Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:			
	a. Koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/Project (STAR-SDP)</i>	Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project (STAR SDP)</i>	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah.	Dokumen Koordinasi dan sosilisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	e. Koordinasi penyusunan Jakarta <i>Commitment</i> dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	Dokumen koordinasi penyusunan Jakarta <i>Commitment</i> dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Tabel 27
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
	f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	h. Koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Dokumen koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	i. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	j. Koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	Dokumen koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	k. Koordinasi penataan ruang	Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	l. Koordinasi peningkatan upaya mit-gasi dan pengurangan resiko bencana alam	Dokumen koordinasi peningkatan upaya mit-gasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	m. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	1 dokumen	100 %
	n. Pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	Dokumen pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	1 dokumen	1 dokumen	100 %

Berikut penjelasan mengenai pencapaian pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 sebagaimana tertulis dalam tabel di atas sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Kegiatan ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa konsep awal/ sementara mengenai garis-garis besar rancangan RPJMN 2010-2014 dan rancangan rencana pembangunan tahunan (RKP) 2009. Kemudian, khusus untuk rancangan RKP tahun 2009 telah ditetapkan menjadi RKP 2009 melalui Peraturan Presiden. Kedua kegiatan penyusunan rencana pembangunan nasional tersebut telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2008 sebanyak 2 dokumen.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 2008 tersebut merupakan kelanjutan dari pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menghasilkan Rancangan RPJP 2005-2025 dan Rancangan RKP Tahun 2008. Kemudian, kedua rancangan tersebut disetujui oleh Pemerintah (Presiden) dan DPR, menjadi RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan menjadi UU No. 17 Tahun 2007, dan RKP Tahun 2008. Kedua dokumen rencana pembangunan tersebut merupakan penjabaran dari amanat amandemen UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

RKP tahun 2008 merupakan pejabaran tahun ke empat dari RPJM periode 2005-2009 sedangkan penyusunan rancangan RPJMN 2010-2014 merupakan penjabaran dari RPJPN periode 2005-2025 untuk tahap ke II periode 2010-2014 dari 4 periode yang akan dicapai pada tahun 2025. Dokumen RKP dan Rancangan RPJMN tersebut selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) tahunan dan rencana strategis (Renstra) bagi kementerian/lembaga.

Untuk menghasilkan dokumen RPJPN, RPJMN dan RKP tersebut di atas, Bappenas juga melakukan kegiatan lainnya untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan nasional tersebut, antara lain: kajian/telaahan di berbagai bidang pembangunan; koordinasi pembangunan dengan seluruh *stakeholders* baik tingkat pusat maupun daerah; evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJMN 2005-2009 dan RKP; serta melakukan koordinasi strategis lainnya di bidang perencanaan pembangunan nasional dan penanganan masalah penting dan mendesak sesuai dengan penugasan Presiden. Seluruh kegiatan tersebut akan dijelaskan tersendiri dalam masing-masing kegiatannya.

Disadari bahwa untuk mencapai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan-kegiatan tersebut di atas, terdapat beberapa hambatan, antara lain: 1) Adanya perbedaan pandangan antara instansi pemerintah sehingga menyulitkan penyusunan rencana-rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat disepakati bersama; 2) sumber pendanaan APBN yang belum memadai untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJM 2005-2009 dan RKP (tahunan); 3) adanya pengurangan (revisi) anggaran di dalam APBN tahun 2008 sebesar 10% untuk semua K/L, disebabkan kondisi

keuangan negara yang sulit akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan Kementerian Negara PPN/Bappenas harus melakukan penyesuaian kegiatan dan sasaran karena anggarannya yang berkurang; 4) proses revisi di Departemen Keuangan yang lebih dari 2 bulan (termasuk proses pembahasan dengan DPR) menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan pada semester pertama tahun 2008.

Beberapa langkah penyelesaian masalah atau hambatan di atas, adalah sebagai berikut: 1) meningkatkan kuantitas (dalam batas tertentu) dan kualitas pertemuan dengan para *stakeholders* (semua K/L atau mitra kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas); 2) semua kedeputian dan direktorat perencana di Kementerian Negara PPN/Bappenas bersama-sama dengan K/L yang menjadi mitra kerjanya melakukan optimalisasi anggaran (yang berkurang) terhadap pencapaian target nasional yang telah ditetapkan dalam RKP 2008 dan juga terhadap target masing-masing K/L; 3) optimalisasi anggaran juga dilakukan di Kementerian Negara PPN/Bappenas dan sekaligus percepatan pelaksanaan kegiatan yang tertunda atau terhambat pada semester pertama 2008, serta melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan kegiatan Kementerian Negara PPN/Bappenas; serta 4) mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pembiayaan pembangunan barang-barang publik (*public good*) yang memerlukan investasi besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur berskala besar; hal ini sedang dilakukan antara lain dengan menerbitkan *Public Private Partnersip* (PPP) Book, dan penyusunan konsep kebijakan PPP.

2. Pengkajian Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penyusunan *Background Studies* sebagai bahan utama untuk penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014 dan Kajian Strategis Lainnya

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan berbagai kajian/telaah strategis yang kesemuanya dimaksudkan sebagai dukungan atau bahan utama untuk pengambilan kebijakan pembangunan termasuk untuk penyusunan dokumen perencanaan (RKP dan RPJMN 2010-2014). Jumlah kajian yang dihasilkan pada tahun 2008 sebanyak 71 kajian, terdiri dari 35 kajian isu strategis (sektor, bidang, daerah termasuk 3 kajian prakarsa strategis yang bersifat lintas sektor/bidang dan atau lintas daerah/wilayah) dan 36 *background studies*. Semua kajian tersebut, pada tahun 2009 akan diseleksi secara ketat baik dari sisi kualitas *output* maupun sisi prosesnya (ketaatan pada peraturan dan konsistensi dengan TOR-nya) serta hasil

revisi Inspektorat Kementerian Negara PPN/ Bappenas, untuk diterbitkan dalam majalah Info Kajian Kementerian Negara PPN/Bappenas edisi 1-2 tahun 2009, seperti yang dilakukan terhadap semua kajian tahun 2008, yang berhasil diseleksi dan diterbitkan dalam Info Kajian edisi 1 dan 2 tahun 2008 yang sudah disampaikan kepada seluruh Setjen/Setama//Biro Perencanaan kementerian/lembaga, Bappeda Propinsi, Kabupaten/Kotan, beberapa perguruan tinggi dan anggota DPR mitra kerja. Penyampaian Info Kajian yang mendapat respon positif dari *stakeholders* tersebut dimaksudkan untuk membangun dan membina hubungan kerja dan *sharing ideas* di bidang perencanaan pembangunan.

Dari 71 kajian tersebut terdapat 36 *background studies* yang akan digunakan sebagai bahan atau masukan utama penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 yang penyusunannya dilakukan pada tahun 2009 antara lain dengan mempertimbangkan Visi-Misi Presiden terpilih. Substansi *background studies* tersebut, antara lain mulai dari ekonomi makro, transportasi, investasi, usaha kecil-menengah dan koperasi di bidang pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan daerah/wilayah dan perkotaan dan perdesaan. Tanpa *background studies* maka penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 tidak dapat dilakukan dengan baik dan akuntabel terutama dari sisi substansinya. Dengan demikian, *background studies* merupakan hal yang harus dilakukan, seperti yang juga dilakukan ketika menyusun RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2005-2009 beberapa tahun yang lalu.

Kajian-kajian strategis yang dilaksanakan pada tahun 2008 adalah kajian yang dilakukan oleh unit kerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas yang mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan nasional, yaitu penyusunan RKP 2009, RKP 2010 dan RPJMN 2010-2014, dan sebagian kecil oleh unit-unit kerja pendukung. Berikut ini, bidang kajian yang dilakukan di Kementerian Negara PPN/Bappenas pada tahun 2008 (tidak termasuk *background studies* yang wajib dilaksanakan), yang dikelompokan sesuai nama-nama kedeputiannya.

- **Bidang sumber daya manusia dan kebudayaan** meliputi *backgorund studies* untuk penyusunan rancangan RPJMN 2010-2014 di bidang pembangunan kesehatan, pendidikan, agama, kependudukan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, serta pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga,
- **Bidang politik, hukum dan pertahanan keamanan** meliputi kajian bidang pengembangan masyarakat sipil dalam konteks hubungan negara dengan masyarakat; kajian *key*

performance indicator untuk instansi pemerintah; bidang hukum investasi dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, serta kajian strategi keamanan nasional.

- **Bidang kemiskinan, ketenagakerjaan, dan usaha kecil menengah** meliputi kajian strategi penanggulangan kemiskinan, bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
- **Bidang ekonomi** meliputi *background studi* bidang ekonomi makro; perdagangan investasi dan kerjasama ekonomi internasional; industri; iptek; BUMN; kajian pengelolaan resiko fiskal sebagai dampak penerbitan obligasi pemerintah; dan pengembangan kebijakan lembaga pembiayaan mikro.
- **Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup** meliputi kajian pengembangan industri pertanian melalui peningkatan sistem pelayanan agribisnis; ketahanan pangan nasional; pengembangan jasa lingkungan hutan; pola konsumsi ikan masyarakat Indonesia; kebijakan kelautan dan perikanan; lingkungan hidup, dan kajian mengenai keberlangsungan pembangunan nasional setelah kegiatan penambangan.
- **Bidang sarana dan prasarana** meliputi kajian penyusunan strategi nasional pengelolaan sumber daya air; kajian skema pembiayaan dan implementasi penanganan banjir di kota-kota besar; kajian awal *roadmap* perencanaan pembangunan transportasi nasional jangka menengah dan jangka panjang; kajian kebijakan energi (*energy policy*) kajian penyusunan konsep kebijakan, program, dan pola investasi penanganan perumahan kumuh di Indonesia; kajian pemanfaatan rencana aksi pembangunan pembangkit listrik panas bumi nasional; kajian bentuk penyusunan strategi pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur.
- **Bidang pengembangan regional dan otonomi daerah** meliputi kajian kebijakan pengembangan wilayah; kajian pengembangan model keterkaitan regional; strategi pengembangan kelembagaan kawasan; kajian studi evaluasi (*impact*) penataan daerah otonom baru; kajian penataan kelembagaan daerah tahun 2008; kajian strategi nasional pembangunan perdesaan; penyusunan kebijakan jangka menengah bidang perkotaan, tata ruang, dan pertanahan.
- **Bidang pendanaan pembangunan** meliputi kajian analisis dan formulasi kebijakan pemanfaatan sumber – sumber pendanaan pembangunan non-APBN; kajian penyempurnaan

program pembangunan; kajian peningkatan harmonisasi kerjasama bilateral negara – negara non-OECD; kajian optimalisasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa dan IFAD, dan kajian evaluasi proyek pembangunan.

- **Bidang evaluasi kinerja pembangunan** meliputi kajian pengembangan indikator kinerja pembangunan daerah; kajian evaluasi kinerja pembangunan sektoral; kajian studi dan pemetaan berbagai kebijakan yang terkait dengan evaluasi kinerja pembangunan.

Dibandingkan dengan tahun 2007, kegiatan kajian tahun 2008 lebih banyak dan padat karena selain melakukan *background studies* juga terdapat kajian strategis lainnya yang digunakan sebagai masukan penyusunan RKP 2009 dan RKP 2010, serta kebijakan-kebijakan tertentu yang melibatkan instansi lain, seperti kebijakan energy (*energy policy*) dan kebijakan pangan (*food policy*). Untuk menjaga kualitas hasil kajian, pada tahun 2008 telah diterbitkan 2 (dua) edisi majalah Info Kajian berisi kajian-kajian tahun 2007 yang sudah diseleksi ketat (untuk memenuhi prinsip-prinsip *good governance*) dari sisi kualitas *output* dan kualitas proses pelaksanaan (ketaatan pada peraturan konsistensi dengan TOR-nya sesuai hasil rewiu Inspektorat Kementerian Negara PPN/ Bappenas). Keterlibatan Inspektorat pada Info Kajian 2008, adalah merupakan perbaikan dari Info Kajian 2007 yang hanya menilai kualitas *output*-nya saja, sedangkan untuk kajian-kajian yang dilaksanakan tahun 2008 akan diselesaikan pada tahun 2009 untuk masuk info kajian edisi 1 dan 2 tahun 2009.

Adapun permasalahan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kajian-kajian pada tahun 2008, antara lain: 1) sangat padatnya kegiatan setiap unit kerja dalam melaksanakan tupoksinya, selain melakukan kajian juga pada waktu yang bersamaan harus menyusun Rancangan RKP 2009, melakukan evaluasi dan koordinasi dengan unit kerja internal (antar sektor/bidang) dan eksternal dengan K/L lain; 2) proses revisi atau pengurangan anggaran 10% (untuk semua K/L) yang memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan (antar K/L dan Pemerintah dengan DPR, serta proses administrasi revisi DIPA di Depkeu) menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan kajian menjadi terbatas.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain: 1) mengoptimalkan SDM Bappenas dengan jadwal waktu yang sangat ketat dalam pelaksanaan tugas baik tugas menyusun rencana pembangunan dan pengkajian kebijakan sehingga tidak

jarang harus bekerja hingga malam hari dan pada hari-hari libur; 2) melibatkan narasumber atau tenaga ahli yang kompeten.

3. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pendanaannya

Kegiatan penyusunan rencana pendanaan nasional menghasilkan Penetapan Pagu Indikatif Kementerian/Lembaga, melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan. Sebagaimana tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya, kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2008.

Untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional baik jangka panjang, menengah maupun tahunan diperlukan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* pembangunan. Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas *participative planning*. Pada awal tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai koordinasi dengan seluruh pelaku pembangunan. Salah satunya adalah pertemuan antara Menteri Negara PPN/Bappenas dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan proyeksi angka makro dalam pencapaian pembangunan nasional untuk RKP 2009 dan prediksi atas situasi keuangan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Selanjutnya Menteri Negara PPN/Bappenas menentukan besaran *resources envelope* sebagai acuan dalam menentukan ancer-ancer besaran alokasi anggaran (pagu indikatif) bagi semua Kementerian/Lembaga (K/L). Pagu indikatif tersebut ditetapkan melalui surat edaran bersama (SEB) antara Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan disampaikan kepada seluruh Kementerian/ Lembaga dalam pada Rapat Koordinasi Tingkat Pusat (Rakorpus). Kemudian, Pagu Indikatif tersebut menjadi acuan bagi K/L untuk menyusun rencana kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Koordinasi strategis berikutnya adalah Musyawarah Pembangunan baik tingkat propinsi (Musrenbangprop) maupun nasional (Musrenbangnas). Musrenbang adalah suatu media pembahasan dalam proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sejak Januari hingga April/Mei, secara berjenjang mulai tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional. Hasil Musrenbang kabupaten/kota tersebut menjadi bahan usulan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) kabupaten/kota dalam pembahasan di Musrenbang propinsi (Musrenbangprop). Hasil Musrenbangprop tersebut

menjadi usulan rencana pembangunan daerah masing-masing propinsi yang selanjutnya dibahas dalam Musrenbang nasional (Musrenbangnas). Musrenbangnas tahun 2008 dilaksanakan pada akhir bulan April 2008. Peserta Musrenbangnas adalah seluruh kepala daerah, Kepala Bappeda propinsi/kabupaten/kota. Musrenbang dibuka oleh Presiden, diisi arahan Presiden dan Wakil Presiden, serta diskusi dengan beberapa Menteri terkait, agar terdapat pandangan yang sama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah.

Seluruh kegiatan Musrenbang tersebut khususnya koordinasi dalam Musrenbangprop dimana Kementerian Negara PPN/Bappenas terlibat (hadir), dan Rakorpus serta Musrenbangnas di Jakarta telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2008. Kegiatan Rakorpus dan Musrenbangnas adalah kegiatan rutin yang sangat strategis yang dilakukan Kementerian Negara PPN/Bappenas untuk menghasilkan Rancangan RKP tahunan yang akan ditetapkan Presiden setelah mendiskusikan anggarannya (APBN) dengan DPR. Semua kegiatan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mensinkronisasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Pada tahun 2008, pelaksanaan dan hasil Rakorpus dan Musrenbangnas lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007. Hal ini disebabkan adanya persiapan yang lebih baik, dari sisi kelengkapan dan penyempurnaan materi atau substansi yang akan dibahas serta mekanisme pembahasannya. Hasil Musrenbangnas dituangkan dalam kesepakatan bersama pada akhir Musrenbangnas. Kesepakatan tersebut menjadi acuan K/L dan Pemda untuk menindaklanjuti lebih rinci, jika diperlukan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Rakorpus dan Musrenbang tahun 2008 terdapat beberapa hambatan, yaitu: 1) masih relatif lemahnya komitmen atas tindaklanjut kesepakatan yang dihasilkan dalam Musrenbangnas untuk dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dan daerah; 2) belum terpenuhinya sebagian usulan rencana kegiatan dan anggaran pembangunan baik untuk kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah, terutama disebabkan keterbatasan anggaran.

Langkah antisipatif yang dilakukan adalah 1) mendorong hasil kesepakatan tersebut untuk dapat dipatuhi melalui pertemuan bilateral bersama antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah; dan 2) menentukan kegiatan-kegiatan yang prioritas agar sesuai dengan sumber pendanaan yang tersedia.

4. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional

Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJM periode 2005-2009 dan RKP 2007 termasuk Evaluasi Kinerja Tahunan Pemerintahan SBY-JK. Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat strategis untuk melihat kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Bahan hasil evaluasi disusun berdasarkan proses evaluasi secara berjenjang yang dimulai dari laporan evaluasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang disampaikan oleh Walikota/Bupati kepada pemerintah propinsi. Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kepada Menteri Negara PPN/Bappenas. Kemudian, Kementerian Negara PPN/Bappenas mengolah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah untuk dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Seluruh proses pelaksanaan evaluasi tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional. *Output* kegiatan evaluasi tersebut adalah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2005-2009 dan RKP 2007 serta buku Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan SBY-JK Tahun 2007.

Kegiatan evaluasi merupakan bagian dari kegiatan penyusunan rencana pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan dokumen rencana pembangunan (RKP) yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut juga dilakukan pada tahun 2007, yaitu Evaluasi atas Pelaksanaan RKP 2006 dan Evaluasi atas Pelaksanaan 2 Tahun RPJMN 2005-2009 serta buku Evaluasi Kinerja Pemerintahan SBY-JK Tahun 2006. Dengan demikian, kegiatan evaluasi tersebut telah berhasil dilaksanakan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2008.

Dibandingkan dengan tahun 2007, dari sisi substansi, kegiatan evaluasi tersebut di atas jauh lebih baik, lebih fokus dan dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan telah dibentuknya Kedeputan Evaluasi Kinerja Pembangunan pada akhir tahun 2007. Walaupun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi dirasakan masih terdapat dan hambatan, yaitu: 1) terdapat beberapa instansi atau daerah yang terlambat menyampaikan Laporan Hasil Evaluasinya, atau tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut di atas;

dan 2) belum optimalnya sosialisasi mengenai sistem aplikasi pelaporan sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, sehingga banyak instansi yang kesulitan dalam menyusun laporan sesuai dengan aplikasi program yang telah ditetapkan. Sedangkan upaya penyelesaiannya adalah dengan melakukan: 1) teguran melalui surat kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemda (SKPD terkait); serta 2) sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan evaluasi kinerja di beberapa Kementerian/Lembaga dan Pemda 3) penyempurnaan aplikasi pelaporan PP No. 39 Tahun 2006.

5. Koordinasi Strategis lainnya yang bersifat sektoral/bidang dan daerah serta lintas sektoral/bidang dan lintas wilayah

5.a. Reformasi Audit Nasional-Program/Proyek Pembangunan Sektoral (*State Audit Reform Sectoral Development Project; STAR SDP*)

STAR-SDP merupakan suatu proyek strategis yang didisain pada akhir tahun 2004 dan dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga 2009 yang kemudian dilanjutkan hingga 2010. Proyek ini melibatkan instansi pemerintah dan lembaga tinggi negara yaitu Depkeu (Itjen Depkeu, Ditjen Perbendaharaan, dan STAN/BPPK), Bappenas (Kedeputian Polhukhankam, Direktorat Aparatur Negara), Itjen Depdagri yang juga membina Bawasda Propinsi dan Kabupaten/Kota, Itjen Diknas, BPKP, BPK, dan Sekretariat DPR. Dalam proyek ini, Bappenas ditugaskan menjadi koordinator proyek (*Investment Loan Manajemen Unit, ILMU*) untuk membangun diklat gelar dan non gelar di bidang akuntansi pemerintahan; pengembangan substansi audit kinerja (*performance audit*) disamping audit keuangan (*financial audit*), dan kegiatan lainnya yang strategis di instansi dan lembaga lainnya yang dikoordinasikan Bappenas sebagai ILMU, yaitu BPK, BPKP, Itjen Depkeu, Itjen Depdagri dan Bawasda pada beberapa propinsi dan kabupaten/kota terpilih, STAN/BPPK, dan Itjen Depdiknas. Sedangkan Ditjen Perbendaharaan-Depkeu mendapat tugas sebagai koordinator untuk Program Loan Management Unit (PLMU) yang tugas utamanya adalah menghasilkan peraturan tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Tugas ILMU dan PLMU saling menunjang, sehingga Bappenas juga terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan R-PP SPIP yang telah ditetapkan menjadi PP No. 60 Tahun 2008 mengenai SPIP.

Sebagai koordinator-ILMU, Bappenas harus mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan STAR SDP yang tertuang dalam *Project Management Administration (PAM)* yang kemudian berubah menjadi *Work Plan*. Beberapa kegiatan ILMU Bappenas yang dilaksanakan bersama-sama dengan instansi/lembaga dikoordinasikannya, yang

secara signifikan berpengaruh besar khususnya terhadap peningkatan kapasitas lembaga dan kompetensi auditor atau para pegawai yang lainnya yang ditugaskan mendalami akuntansi pemerintahan, adalah sebagai berikut: 1) pembentukan program S1-S2 untuk studi akuntansi pemerintahan (pertama kali di Indonesia, sebelumnya hanya akuntansi umum) di 36 perguruan tinggi negeri dan swasta yang dinilai layak sesuai kriteria Dirjen Dikti-Depdiknas, yang dilanjutkan dengan pemberian beasiswa STAR-SDP (sumber *loan* dan *grant*) kepada 664 auditor (S1=30, S2= 634; Bawasda 334 orang dan 300 dari ltjen K/L); dan dari APBD Pemprop Gorontalo, Sulsel dan DKI sebanyak 34 dan anggaran Depdiknas sebanyak 302 orang, serta biaya pribadi sebanyak 4 orang (data hingga Maret 2009); 2) penyusunan lebih dari 16 modul diklat akuntansi dan audit, yang menjadi acuan BPPK atau lembaga lainnya di daerah untuk melaksanakannya; 3) diklat dengan menggunakan 16 modul tersebut di 25 PTN/PTS yang sudah memiliki program studi akuntansi pemerintahan untuk sebanyak 2400 pegawai (auditor dan non auditor) hingga tahun 2010; 4) mengembangkan dan mencantumkan materi audit kinerja (*performance audit*) dalam diklat dan program S1-S2 di atas; 5) mendukung secara intensif pemberdayaan auditor dan lembaga BPK serta SDM di Sekretariat DPR untuk menyiapkan dan membaca laporan hasil audit BPK untuk bahan anggota DPR.

Keterlibatan Pemda dan perseorangan dalam program S1-dan S2 di atas menunjukkan keberhasilan program STAR SDP (pengembangan program S1, S2 akuntansi pemerintahan) yang dikoordinasikan ILMU Bappenas. Demikian juga, jumlah peserta diklat, juga menunjukkan peningkatan dibandingkan target, serta meningkatnya kesadaran mengenai perlunya peningkatan kompetensi pegawai di bidang akuntansi pemerintahan. Sumber anggaran beasiswa diklat gelar dan non gelar dari STAR SDP sebagian besar diperoleh dari hibah Pemerintah Belanda dan ADB.

Walaupun STAR SDP ILMU Bappenas berhasil mencapai target bahkan melampaui yang direncanakan (antara lain: penambahan hibah dari Pemerintah Belanda untuk beasiswa karena dinilai berhasil, dan juga beberapa Pemda dan K/L menganggarkannya dari APBD/anggarannya sendiri), namun semuanya itu dicapai dengan relatif sulit karena beberapa hambatan. Hambatan yang dialami terutama mengenai koordinasi antara K/L termasuk BPK dan Sekretariat DPR pada 2 tahun pertama pelaksanaan STAR SDP, disebabkan beberapa perbedaan pandangan dan kondisi internal masing-masing lembaga. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan

bahkan menjadi tim yang saling mendukung, melalui pertemuan koordinasi secara intensif berdasarkan kesejajaran dalam kepentingan yang sama yaitu menuju audit untuk membangun *good governance*, sesuai moto STAR SDP ILMU Bappenas: *audit for good governance*. Keberhasilan pelaksanaan STAR SDP tersebut dapat dirasakan dari tahun ke tahun, dan diharapkan pada tahun 2010 keberhasilan tersebut akan meningkat dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam *Loan Agreement STAR SDP* yang ditandatangani pada akhir Desember 2004.

5.b. Koordinasi Pelaksanaan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KPPI)

Dalam tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Inpres 5/2008 tentang fokus program ekonomi 2008-2009 yang memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, termasuk kebijakan bidang infrastruktur. Terkait dengan kebijakan infrastruktur tersebut, Inpres 5/2008 menyebutkan bahwa kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur dilakukan melalui kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) atau *public private partnership* (PPP), kebijakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui percepatan penyediaan tanah dan pembiayaan serta penegasan kebijakan pemerintah dalam kewajiban layanan publik. Dalam hal ini, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapat tugas mempersiapkan kelembagaan dan kebijakan KPS tersebut.

Pada tahun 2008, Bappenas bersama dengan Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) telah berupaya mendorong percepatan penyelesaian revisi peraturan yang menjadi tonggak baru pelaksanaan KPS yaitu Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Saat ini proses revisinya telah selesai dan menunggu pengesahannya. Revisi Perpres ini akan dilampiri dengan pedoman teknis pelaksanaan KPS untuk tingkat pusat dan daerah. Selain revisi Perpres 67/2005, di lingkup sektor beberapa keluaran yang terkait dengan pengembangan KPS telah berhasil diselesaikan. Setelah pengesahan UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pemerintah juga telah mengesahkan UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dan UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Terkait dengan pelaksanaan Inpres 5/2008, sejak tahun 2008 Direktorat PKPS sedang berupa menyelesaikan penyusunan Buku KPS (*PPP Book*) yang akan menjadi dokumen rencana proyek KPS dan menjadi salah satu prioritas pemerintah. Penyusunan Buku KPS diharapkan akan memudahkan pemerintah untuk merencanakan pemberian dukungan pemerintah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek KPS. Selain itu, Buku KPS juga akan menjadi media bagi pemerintah untuk mempromosikan Proyek KPS kepada investor, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek KPS.

Buku KPS akan disinergikan dengan dokumen perencanaan pemerintah seperti RPJM, Renstra dan RKP, serta disinkronisasikan dengan kondisi anggaran pemerintah dan swasta. Untuk mendukung peningkatan kualitas proyek KPS, sejak tahun 2008 sedang digagas upaya pembentukan Pusat KPS di Bappenas, yang embrionya dari Direktorat PKPS. Selain itu, saat ini di Bappenas juga telah dibentuk Tim KPS berdasarkan SK Meneg PPN No. 194A/M.PPN/08/2008 untuk memperluas lingkup KPS yang masih terbatas pada infrastruktur dalam Perpres 67/2005. Dibandingkan dengan tahun 2007, upaya dan kinerja kegiatan tahun 2008 di bidang KPS lebih baik, mengingat kegiatan tahun 2008 merupakan kelanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun 2007. Kebijakan KPS sangat strategis dan menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemahaman berbagai *stakeholders* mengenai KPS tersebut. Karena itu, upaya penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai pertemuan secara mendalam agar terbentuk pemahaman yang sama antar *stakeholders*.

5.c. Koordinasi Pengembangan *Good Governance* melalui sosialisasi dan pengembangan *Good Governance Index* (GGI)

Koordinasi *Good Governance* pada tahun 2008 lebih ditekankan pada pengembangan konsep *Good Governance Index* (GGI) yang penyusunan awalnya dilakukan pada semester kedua tahun 2007. Penyusunan GGI tersebut dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pemda dan juga K/L dalam mengukur tingkat penerapan *good governance*-nya. GGI

dikembangkan dengan LGSP (*Local Government Support Programm*) USA-AID dan juga secara terbatas dengan Depdagri, namun Bappenas memberikan kontribusi anggaran dan substansi anggaran yang lebih besar. Konsep GGI yang dikembangkan difokuskan kepada penerapan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, sebagai tindak lanjut studi Bappenas tahun 2006 di 174 kabupaten/kota, 24 propinsi dan 14 K/L yang menemukan kelemahan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen dengan benar, konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja. Bappenas juga melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan *good governance* antara lain dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian PAN, Bank Indonesia, dan Komite Nasional Kebijakan *Good Governance* (KNKG). Selain itu, Bappenas juga menyusun beberapa buku *good governance* dan mengirimkannya ke semua Pemda (Setda) dan Setjen/Sekut K/L.

Pada tahun 2008, konsep GGI sudah diujicobakan (*pre-test*) di beberapa Pemda, antara lain Kabupaten Klaten, Sidenreng Rappang (Sulsel), Kabupaten Bekais dan Binjai, dan mendapat sambutan baik. Mereka menyarankan agar GGI segera dapat diselesaikan. Hal ini disebabkan, sebelum GGI Bappenas, ada beberapa konsep GGI yang dikembangkan beberapa lembaga mitra, namun masih umum dan cenderung menggunakan ukuran-ukuran indeks pembangunan sektor kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Penggunaan GGI dengan fokus pada manajemen akan turut mendorong penerapan manajemen di instansi pemerintah pusat dan daerah, dan hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan anggaran berbasis kinerja.

Dibandingkan dengan kinerja tahun 2007, pelaksanaan pengembangan *good governance* tahun 2008 lebih baik yaitu dengan telah disempurnakan dan diujicobakannya (*pre-test*) *Good Government Index* di beberapa pemerintah daerah, serta mendapat respon yang positif. Diharapkan, pada tahun 2009, GGI tersebut sudah dapat diluncurkan dan menjadi salah satu referensi dalam penerapan *good government* di berbagai instansi pemerintah. Selain itu, mengingat fokus GGI adalah pada penerapan fungsi-fungsi manajemen, maka hal ini akan sangat relevan dan mendukung kebijakan penganggaran berbasis kinerja.

Disamping keberhasilan di atas, dijumpai sedikit hambatan terutama pada pengembangan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen. Namun hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan kajian mendalam dari

beberapa literatur, diskusi dengan para nara sumber dan uji coba (*pre-test*) di beberapa pemda di atas.

5.d. Koordinasi Program RAN-PK di Tingkat Pusat dan Daerah, serta *United Nation Conference for Anti-Corruption (UNCAC)*

Pelaksanaan koordinasi Program Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dilakukan Bappenas sesuai Inpres No. 5 Tahun 2005. Dalam hal ini, Bappenas telah bekerja sama dengan instansi pusat (antara lain BKPM, BPN, Ditjen Pajak dan Samsat) dan daerah dalam mendorong setiap instansi untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi. Dalam tahun 2008 telah berhasil disempurnakan dokumen RAN PK Instansi di 92 instansi pelaksana tingkat pusat dan 500 instansi pelaksana di daerah. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi RAN PK di 11 daerah, yaitu NAD, Bali, Papua, Pangkal Pinang, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, NTT, Kepulauan Riau dan Yogyakarta. Dibandingkan tahun 2007 yang terbatas pada sosialisasi RAN-PK di beberapa daerah saja (antara lain di Kabupaten Bandung, Pemalang, Denpasar, Jembrana, dan Indramayu), kinerja koordinasi RAN-PK pada tahun 2008 relatif lebih baik, termasuk melakukan penyempurnaan dokumen RAN-PK di banyak instansi pemerintah di pusat dan daerah.

Terkait dengan kegiatan koordinasi RAN-PK, pada tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas turut berperan aktif bersama-sama dengan Departemen Luar Negeri dan KPK dalam mengadopsi UNCAC di Indonesia. Komitmen pelaksanaan UNCAC ini merupakan salah satu pendorong untuk penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Indonesia, dimana salah satu kegiatan strategisnya adalah pemberantasan korupsi.

Adapun hambatan yang dihadapi adalah masih ada instansi pemerintah yang enggan untuk menyusun dan menerapkan RAN-PK di lingkungannya. Namun demikian, hal ini akan terus diupayakan penyelesaiannya melalui sosialisasi dan diskusi secara intensif dengan pimpinan masing-masing instansi.

5.e. Koordinasi Penyusunan Jakarta Commitment dengan Mitra (Bilateral dan Multilateral) untuk Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan PHLN.

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/ Bappenas bekerjasama dengan Depkeu melakukan terobosan dalam pengelolaan PHLN yaitu dengan mengajak para mitra pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) baik bilateral (Jepang, USA, Inggris, Korea, Spanyol, Perancis, Belanda, Kanada, dsb) maupun multilateral (ADB, UNDP, WB, dan sebagainya) untuk menyepakati *Jakarta Commitment* yang akan memberikan ruang bagi Pemerintah Indonesia untuk mendisain dan menentukan sendiri peruntukan dan pengelolaan PHLN yang diterimanya (*Government of Indonesia driven* atau *GOI driven*). Pada tahun 2008, persiapan *Jakarta Commitment* dilakukan secara intensif melalui beberapa kali pertemuan dengan para mitra, dan hasilnya adalah konsep final yang akan ditandatangani di Bappenas pada awal tahun 2009 dengan semua mitra dan pemerintah Indonesia (diwakili Bappenas dan Depkeu).

Hasil (*outcome*) yang sangat dirasakan dari *Jakarta Commitment* adalah perubahan *donor driven* dalam perencanaan dan pelaksanaan PHLN menjadi *GOI driven*, sehingga Indonesia memiliki kemandirian dalam alokasi PHLN untuk membiayai program-program pembangunan di Indonesia. Dengan demikian, GOI memiliki *bargaining position* yang lebih kuat dalam pengelolaan PHLN di Indonesia. Suatu keberhasilan yang signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007 atau tahun-tahun sebelumnya, dimana pihak mitra memiliki *bargaining position* yang lebih kuat dibandingkan dengan GOI.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam menyusun konsep *Jakarta Commitment* tersebut terutama adalah para mitra cenderung enggan dengan konsep yang ditawarkan pihak Indonesia. Namun demikian, melalui pertemuan yang intensif, hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik, bahkan pada akhirnya para donor merasa tidak etis jika tidak menyetujui konsep *Jakarta Commitment*, misalnya pihak Spanyol segera mengirimkan Menteri yang menangani PHLN ke Jakarta untuk turut menyepakatinya, setelah banyak negara donor dari Eropa lebih dahulu menyetujui konsep *Jakarta Commitment* tersebut.

Apabila dibandingkan dengan pengelolaan PHLN tahun 2007 atau tahun-tahun sebelumnya, pengelolaan PHLN sudah melangkah lebih maju yaitu mulai dirintisnya *Jakarta Commitment* yang direncanakan ditandatangani oleh GOI dan semua donor pada bulan Januari 2009.

5.f. Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Manusia (PNPM)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program terobosan bagi Kabinet Indonesia Bersatu. Terlepas dari berbagai kekurangan dan hambatan yang dihadapi pada pelaksanaannya, pada tahun 2008 PNPM mandiri telah mencakup 4.768 kecamatan atau sekitar 74% dari total kecamatan yang ada. Dalam hubungan ini, Kementerian Negara PPNBappenas berperan aktif dalam pengembangan kebijakan PNPM Mandiri, dan mendukung instansi lain seperti Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

PNPM Mandiri merupakan kebijakan payung program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan dikategorikan atas PNPM-Inti dan PNPM-Penguatan. PNPM-Inti saat ini program PNPM terdiri dari 5 program, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan (PPIP), dan PNPM Mandiri Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Sedangkan program-program PNPM-Penguatan terdiri atas program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh dan tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga. Dalam implementasinya program-program ini menggunakan konsep dan metode yang mengacu pada PNPM Mandiri.

Sejak diluncurkannya PNPM Mandiri oleh Bapak Presiden R.I. pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah banyak kemajuan pelaksanaan PNPM Mandiri yang telah dicatat. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dirasakan khususnya oleh kelompok masyarakat miskin. Sampai dengan bulan Oktober 2008, jumlah peserta aktif PNPM Perdesaan dan PNPM perkotaan saja di perdesaan telah mencapai jumlah 28, 5 juta peserta dan di perkotaan mencapai jumlah 12,8 juta peserta, sehingga total cakupan peserta aktif mencapai 41 juta lebih. Dengan jumlah cakupan peserta demikian, PNPM Mandiri telah dinyatakan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang terbesar di dunia dari sisi cakupan pesertanya (*World Bank, 2008*). Saat ini program-program dalam PNPM mandiri sedang diteliti di lapangan oleh tim dari sekitar 33 negara yang akan mengadopsi pola PNPM Mandiri ini untuk diterapkan di negara masing-masing.

Pada tahun 2008 ini, PNPM Mandiri sedang dilaksanakan di 47.954 desa/ kelurahan di 3.999 kecamatan dengan anggaran untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp

5,924 triliun, yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 4,296 triliun, PNPM Mandiri Perkotaan sebesar Rp 932 Milyar, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan sebesar Rp 515 milyar, dan PNPM Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus sebesar Rp 181 milyar. Total dana BLM yang telah terserap sampai 15 Desember 2008 mencapai Rp 4,663 triliun (79%). Dana BLM yang belum terserap hingga akhir Desember 2008 akan dilanjutkan pelaksanaannya hingga April 2009 sesuai ketentuan dalam UU APBN 2009.

Gambaran umum pencapaian masing-masing komponen program PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

1) PNPM Perdesaan

Untuk tahun anggaran 2008, telah ditetapkan lokasi sebanyak 2.389 kecamatan yang menyebar di 32 provinsi dan 363 kabupaten. Angka ini belum termasuk lokasi PNPM-Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM-RESPEK) yang dilaksanakan di Papua dan Papua Barat sebanyak 223 kecamatan dan PNPM Generasi sebanyak 178 kecamatan.

Jumlah BLM yang sudah disalurkan pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada tahun 2008, sampai dengan 15 Desember 2008 telah terserap 76% dari total BLM. Sisa anggaran BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang belum terserap akan diluncurkan pada awal tahun anggaran 2009. Hal ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan masyarakat yang belum selesai pada tahun 2008 dapat dilanjutkan hingga 2009.

Beberapa hasil lainnya yang dicapai pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan antara lain adalah:

- a) Perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja baru:
 - 9,19 juta Hari Orang Kerja (HOK) dari 685.883 pekerja lokal. Mayoritas tenaga kerja lokal berasal dari masyarakat sangat miskin (data tahun 2007);
 - Dibukanya usaha/jasa transportasi oleh masyarakat menyusul terbangunnya jalan, jembatan dan dermaga baru yang dikerjakan masyarakat dengan dana PNPM Mandiri Perdesaan;
 - Di perdesaan terdapat sekitar 56.146 kelompok yang aktif dalam kegiatan simpan pinjam dengan pelaku umumnya perempuan (kelompok Simpan Pinjam untuk

Perempuan) dengan peserta mencapai 1.339.000 orang. Tingkat pengembalian pinjaman bergulir dana SPP pada mencapai 94,23%.

b) Peningkatan peran masyarakat, kapasitas lokal dan kelembagaan, dengan sasaran program yang berpihak pada orang miskin dan kesetaraan jender:

- Pada tahun 2008, terdapat 35.530 desa turut berpartisipasi dalam proses demokrasi, berpartisipasi dalam perencanaan, dan pengambilan keputusan;
- Sekitar 62% dari peserta musyawarah perencanaan merupakan kelompok masyarakat paling miskin. Partisipasi perempuan dalam berbagai pertemuan/ kegiatan program, berkisar antara 31-46%;
- Rata-rata swadaya masyarakat adalah 17% dari BLM dan bervariasi di tiap provinsi;
- Sebanyak 82% warga lokal, menyatakan telah memiliki kemampuan berorganisasi dan kapasitas diri berkat pelatihan dari program;
- Sebanyak 72% Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di seluruh kecamatan program berkinerja baik, serta berpotensi untuk berkembang;
- Kontribusi Pemda memberikan dukungan pendanaan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan mencapai Rp 1,49 triliun;
- Kesadaran dan akuntabilitas masyarakat dan Pemda lebih kuat dengan pengawasan yang melibatkan masyarakat/ *Community Participatory Monitoring (CPM)*;
- Program telah membangun mekanisme yang memungkinkan upaya rekonstruksi dan rehabilitasi. Hal ini terbukti dari keberhasilan pelaksanaan program di lokasi bencana;

c) Meningkatkan akses ke pusat kota, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan sumber air bersih:

- Program pada tahun 2007 telah mendanai 7.956 kegiatan pembangunan di 29.847 desa di Indonesia;
- Jalan: 2522 unit dan jembatan sejumlah 903 unit dengan panjang total yang dibangun TA 2007: 5.561.288 meter;
- Pembangunan Sistem Irigasi: 1.161 unit;
- Pembangunan Sistem listrik desa mikro hidro sebanyak: 98 unit;
- Sarana Air Bersih: 1.054 unit; 441 unit Mandi Cuci Kakus (MCK);
- Pendidikan: 1.494 sekolah; 17.305 beasiswa individual; dan 966 kegiatan pendidikan lain;

- Kesehatan: 863 unit Polindes/Posyandu; 532 kegiatan kesehatan lain.

2) Capaian PNPM Perkotaan.

Rencana dan capaian PNPM perkotaan sampai dengan status tanggal 18 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

- a) Sasaran program: 7.868 kelurahan, 916 kecamatan, dengan alokasi BLM TA 2008: Rp 932.575.555.000 dan alokasi pagu non BLM : Rp 520.474.490.210.
- b) Jumlah penerima manfaat dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan sampai dengan status tanggal 18 Desember 2008 adalah 164.249 kelompok masyarakat, penerimaan manfaat langsung 11.318.166 orang; kegiatan dana bergulir untuk 44.979 kelompok; dan kegiatan infrastruktur 106.550 pekerja langsung.
- c) Realisasi BLM yang sudah terserap di TA 2008 mencapai 90,37% dan Non BLM mencapai 85,3 %.
- d) Melalui pola pemberdayaan PNPM Mandiri terjadi penghematan biaya dalam jumlah yang cukup signifikan, sebesar 30-40% dalam pembangunan prasarana desa dibandingkan dengan menggunakan jasa kontraktor.
- e) Jumlah alokasi anggaran BLM yang telah digunakan oleh masyarakat atas kesepakatan masyarakat sendiri, untuk kegiatan pembangunan fisik dan lingkungan mencapai sekitar 70% dari total dana BLM yang dipergunakan untuk membangun jalan, jembatan, MCK, air bersih, drainase, sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, irigasi, dan lain-lain.

3) PNPM – Infrastruktur Perdesaan (PNPM-IP).

Program Infrastruktur Perdesaan dimaksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui: 1) pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan untuk mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan perdesaan, titian, dan tambatan perahu; 2) pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan, dan 3) pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan.

Pada tahun 2007, berdasarkan kesepakatan antara DPR-RI dengan Pemerintah, PNPM-IP ini diberikan pada hampir semua desa-desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pembangunan daerah Tertinggal. Arahan DPR-RI pada waktu itu adalah pemerintah harus menuntaskan kebutuhan prasarana dan sarana dasar di desa-desa tertinggal, sehingga setelah prasaran dan sarana dibangun di desa tertinggal maka pembangunan ekonomi menjadi fokus selanjutnya. Jumlah desa-desa tertinggal yang dituntaskan kebutuhan prasarana dan sarana dasarnya adalah sebesar 16.417 desa. Setiap desa diberikan BLM dengan jumlah yang sama, yaitu Rp. 250 juta/ desa. Jumlah 16.417 desa tertinggal ini terdistribusi pada PNPM Perdesaan sebanyak 12.045 desa tertinggal, PNPM Perkotaan sebanyak 1.528 kelurahan/desa tertinggal, PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus sebanyak 1.044 desa tertinggal, dan PNPM Infrastruktur Perdesaan sebanyak 1.800 desa tertinggal. Di desa-desa yang telah mendapatkan PNPM Perdesaan dan Perkotaan, dana tersebut merupakan tambahan atau *on-top*.

Sumber dana PNPM IP 2008 seluruhnya berasal dari dana APBN TA 2008 sebesar Rp. 515 milyar. PNPM IP pada tahun 2008 dilaksanakan di 26 provinsi dan mencakup 220 kabupaten/kota, di 955 kecamatan atau di 2.060 desa. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten diminta untuk memberikan dukungan biaya operasional dalam menjalankan pendampingan, pengendalian, dan pemantauan. Untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur dibiayai oleh masyarakat dan dukungan anggaran desa (APBDes). Dalam pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga turut berpartisipasi dalam berbagai bentuk, dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp. 2,814 milyar untuk kegiatan infrastruktur perdesaan.

4) PNPM – Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM-DTK)

PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus berasal dari Program P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus. PNPM-Daerah Tertinggal dan Khusus ini diberikan pada daerah-daerah tertinggal dan yang mengalami konflik sosial dan bencana alam.

Total Alokasi BLM PNPM DTK TA 2008 sebesar Rp 181 milyar. Sampai dengan pertengahan Desember 2008 telah disalurkan sebesar 27,2%. Pada tahun 2008, desa tertinggal yang diberikan PNPM DTK adalah 2.496 desa.

5) PNPM – PUAP

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dimulai sejak 2008 ini diberikan kepada 10.573 desa pertanian, di 33 provinsi, 467 kabupaten/kota, dengan bantuan sebesar Rp. 100 juta rupiah/gapoktan/desa. Dana BLM tersebut telah disalurkan sebagian besar kepada gabungan kelompok petani atau gapoktan-gapoktan dengan nilai Rp1,05 Trilyun dengan jumlah rumahtangga petani yang terlibat adalah sekitar 1,32 juta. Terdapat Rp 43 milyar (4%) yang tidak dapat disalurkan disebabkan diantaranya karena wilayahnya yang sangat *remote*, misalnya Papua, dan kekurangsiapan dokumen-dokumen gapoktan calon penerima.

6) PNPM *Support Facility* (PSF)

Untuk mendukung harmonisasi dan kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri, Pemerintah bekerjasama dengan berbagai donor, telah membentuk Fasilitas Pendukung PNPM Mandiri, atau disebut juga dengan *PNPM Support Facility* (PSF). Melalui PSF, diselenggarakan dialog dan koordinasi berbagai hibah dan bantuan teknis dari berbagai donor. Deputi KKUKM Bappenas dalam hal ini bertindak sebagai ketua *Joint Management Committee*, yang keanggotaannya terdiri atas eselon 1 instansi terkait dan donor yang berkontribusi lebih dari USD 1 juta. Untuk mengatur pemanfaatan dana hibah dan pelaksanaan kegiatannya, **Kementerian Negara PPN/Bappenas**, berkoordinasi dengan instansi terkait, telah menerbitkan *PSF Operational Manual* yang mengatur mekanisme kerjasama dari donor dan pengelolaannya ke dalam manajemen PSF, *PSF Portfolio* yang memuat agenda tentatif PSF, dan *SOP PSF* atau Pedoman Mekanisme dan Prosedur Pengelolaan Dana dan Kegiatan PSF.

Adapun **kendala atau hambatan umum** yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi PNPM, adalah sebagai berikut:

- a. Perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah tidak semuanya berjalan baik

Dukungan daerah dalam pelaksanaan PNPM Mandiri tidak semuanya berjalan mulus, meskipun arahan dan sosialisasi telah dilakukan. Alasan yang sering dikemukakan, meskipun tidak dalam bentuk tertulis, beberapa Bupati dan Walikota serta sementara kalangan di DPRD mencurigai program PNPM Mandiri ini adalah program kampanye

terselubung pemerintahan sekarang dalam rangka pemilu 2009. Namun demikian ada beberapa daerah yang komitmennya sangat tinggi dengan menyediakan DDUPB jauh melebihi ketentuan, seperti antara lain: Kota Palopo, Kab. Maros, Kab. Rokan Hulu, Kab. Pasaman Barat, dan Kab. Paser.

Besaran DDUPB ditetapkan dengan mengacu pada Kapasitas Fiskal daerah yang setiap tahun ditetapkan oleh Departemen Keuangan. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah menyediakan DDUPB minimal sebesar 20 % dari total BLM yang disediakan APBN untuk kab/kota yang bersangkutan. Daerah dengan kapasitas fiskal sedang dan tinggi menyediakan minimal DDUPB sebesar 50 %. Dengan sendirinya bilamana daerah tidak menyediakan DDUPB, maka jumlah BLM bagi masyarakat miskin di daerah tersebut berkurang dan semakin sedikit warga miskin yang dapat memanfaatkan program ini.

b. Sinkronisasi Dalam Perekrutan dan Pengadaan Fasilitator

Penambahan cakupan kecamatan yang cukup ekspansif menyebabkan K/L pelaksana kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fasilitator. Adanya perbedaan kualifikasi, struktur gaji, dan insentif antar program, baik program PNPM maupun program pembangunan lainnya menyebabkan "turn over" fasilitator cukup tinggi. Untuk itu diperlukan rencana terpadu pengadaan fasilitator antar program PNPM. Untuk mempertahankan fasilitator yang ada (mengingat banyak fasilitator pindah ke program lain atau menjadi caleg), juga dapat diupayakan hal-hal seperti a.l.: standarisasi remunerasi dan insentif fasilitator, sertifikasi fasilitator agar ada "jenjang karir," menjamin keberlangsungan pelaksanaan program di masyarakat, mengembangkan jaringan informasi antar fasilitator (web, sms, dsb). Remunerasi untuk FT dan fasilitator daerah terpencil perlu mendapat perhatian. Untuk perbaikan ke depan, hal-hal yang dapat dilakukan **Kementerian Negara PPN/Bappenas** antara lain adalah:

- Melakukan identifikasi kebutuhan dan pemenuhan fasilitator, serta harmonisasinya dengan fasilitator program teknis.
- mengklarifikasi peran dan fungsi Pusat dan Pemda dalam pengadaan dan pembinaan (karir/status) fasilitator ke depan.
- Menyusun standarisasi pelatihan fasilitator: modul, metode, institusi pelatihan (lembaga di pusat dan daerah, pengadaan pemandu/ToT, kualifikasi, dsb), fasilitas, biaya.

c. Monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri dilakukan secara partial

Mengingat besarnya cakupan jumlah kecamatan dan program dalam PNPM Mandiri, monitoring dan evaluasi PNPM selama ini baru dilakukan secara parsial di masing-masing program. Oleh karena itu, keberhasilan PNPM secara terpadu sulit untuk diukur. Untuk itu, akan dibangun sistem pengelolaan informasi (SPI) yang terintegrasi agar pelaksanaan dan kinerja keberhasilan program-program PNPM Mandiri dapat dengan mudah dipantau dan dievaluasi dengan mengacu pada kerangka monitoring dan evaluasi PNPM Mandiri. SPI-PNPM Mandiri akan dikembangkan di Pusdatinrenbang Kementerian Negara PPN/Bappenas, dengan *interphasing* ke masing-masing program PNPM Mandiri. Pada tahap selanjutnya, SPI ini diharapkan dapat dihubungkan dengan berbagai SPI di masing-masing sektor dan daerah. SPI akan dikembangkan secara terbuka untuk memudahkan berbagai pihak memanfaatkan data dan informasi terkait dalam rangka mempercepat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.

5.g Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Change*)

Isu perubahan iklim (*climate change*) merupakan isu pembangunan (*development issues*) yang bersifat lintas bidang sektor dan lintas wilayah. Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menyusun rencana pembangunan nasional dikaitkan dengan isu perubahan iklim global. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu tersebut kedalam sektor pembangunan. Langkah-langkah yang diambil dalam menangani perubahan iklim tersebut adalah mengkoordinasikan pengarusutamaan tersebut melalui serangkaian koordinasi, antara lain : (i) Membuat dokumen perencanaan/dokumen pengarusutamaan (*mainstreaming*) perubahan iklim yang disebut dengan “*The Yellow Book*” ; (ii) Mengkoordinasikan perencanaan pendanaan bilateral dan multilateral untuk perubahan iklim ; dan (iii) melakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait seperti Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Meneg Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, dan lain-lain.

Kegiatan penanganan perubahan iklim ini belum pernah dilakukan pada tahun 2007 atau tahun-tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat diperbandingkan. Sedangkan hambatan yang dihadapi adalah masalah koordinasi dan pemahaman yang tidak selalu sama antar instansi yang terkait dalam mengantisipasi perubahan iklim tersebut. Namun, hambatan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan berbagai pertemuan secara intensif dan mendalam baik dalam forum formal maupun informal.

5.h Koordinasi Pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada tahun 2008, sesuai amanat Keppres No. 80 Tahun 2003, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah (LKPP), yang embrionya berasal dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Diharapkan lembaga LKPP tersebut dapat menjadi lembaga yang kredibel dalam pengembangan dan pelaksanaan *good governance* dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pembentukan lembaga LKPP tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas melibatkan beberapa instansi pemerintah terkait seperti Sekneg, Departemen Keuangan, Departemen Hukum dan HAM, Kementerian Negara PAN, Departemen Pekerjaan Umum. Pada semester II telah dilakukan rekrutment pejabat eselon II kebawah melalui proses seleksi yang ketat. Cukup banyak pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas yang lulus proses seleksi yang ketat di LKPP tersebut.

Dibandingkan dengan tahun 2007 atau tahun-tahun sebelumnya, pembentukan LKPP pada tahun 2008 merupakan klimaks dari prestasi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam pengembangan kebijakan barang dan jasa pemerintah. Dampak dari kebijakan tersebut terutama adalah pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih transparan dan akuntabel sehingga berhasil menghemat anggaran pemerintah dan meningkatkan kualitas barang dan jasa pemerintah, baik di instansi pusat maupun daerah.

Hambatan yang dihadapi pada tahun 2008 dalam pembentukan LKPP relatif tidak ada, disebabkan persiapan pembentukan LKPP tersebut sudah dilakukan sejak beberapa tahun sebelumnya sejalan dengan terjadinya krisis keuangan dan multidimensi pada akhir tahun 1980an di Indonesia.

5.i. Koordinasi Pengelolaan Bantuan Hibah (*grant*) Luar Negeri (multilateral dan bilateral) untuk Penyelenggaraan Pemilu 2009.

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas diberi tugas untuk mengkoordinasikan hibah (*grant*) dari para donor bilateral dan multilateral untuk membantu atau mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009, antara lain sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilu yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Hibah tersebut merupakan bantuan dari negara-negara donor dan lembaga internasional yang bekerjasama melalui kerangka kerjasama bilateral dan multilateral. Bantuan dari para donor tersebut dikoordinasikan oleh UNDP. Mengingat kegiatan pengelolaan hibah tersebut melibatkan berbagai K/L dan dalam jumlah dana yang besar, maka diperlukan suatu koordinasi tunggal untuk melaksanakan pengelolaan manajemen (*management arrangement*) yang jelas dan akuntabel. Koordinasi tersebut bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan efektifitas proyek bantuan UNDP bagi Pemilu. Untuk itu, Kementerian Negara PPN/Bappenas ditunjuk menjadi koordinator dalam pengelolaan hibah luar negeri untuk Pemilu 2009. Penunjukan Bappenas sebagai koordinator hibah tersebut disebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat menerima bantuan dari negara-negara asing untuk kegiatan Pemilu, agar KPU tetap netral.

Adapun permasalahan atau hambatan dalam pengelolaan hibah tersebut adalah mekanisme pendanaan hibah yang rumit dan harus sesuai prosedur agar akuntabel, termasuk masalah laporan pertanggungjawabannya yang dapat berimplikasi kepada akuntabilitas Bappenas. Untuk itu, upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan Bappenas adalah dana hibah tersebut tidak masuk dalam anggaran (DIPA Bappenas) tetapi langsung kepada pelaksana atau pihak-pihak pelaksana kegiatan dukungan Pemilu.

5.j. Koordinasi penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2008.

Tahun 2008 merupakan tahun ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari Agenda Ketiga dalam RPJMN 2005-2009 yaitu agenda kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan umum, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga ketersediaannya yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam rincian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan infrastruktur di tahun 2008 terdapat di dalam Prioritas ke-3, yaitu: percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi, dengan sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, transportasi, energi, pos dan telematika, ketenagalistrikan, perumahan dan permukiman. Prioritas pembangunan infrastruktur ini berfokus pada: (1) Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan standard pelayanan minimal; (2) peningkatan daya saing sektor riil; (3) peningkatan investasi proyek-proyek infrastruktur yang dilakukan oleh swasta melalui berbagai skim kerjasama antara pemerintah dan swasta; (4) peningkatan produksi migas dan produk final migas; (5) percepatan pelaksanaan upaya diversifikasi energi, melalui pemanfaatan gas bumi, batubara dan energi baru/terbarukan; dan (6) peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

RPJMN 2004-2009 dan RKP 2008 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting, terutama sebagai: (1) tulang punggung produksi dan pola distribusi barang dan penumpang; (2) perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) pemicu pembangunan suatu kawasan; (4) pembuka keterisolasian suatu wilayah; dan (5) prasyarat kesuksesan pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, memiliki kewenangan yang dapat memaksimalkan potensi dan sumber daya yang tersedia dalam pembangunan infrastruktur.

Dengan implikasi desentralisasi dan otonomi daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, **Kementerian Negara PPN/Bappenas telah menyusun** Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2008 dengan tema "Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Membantu Pengurangan Kemiskinan". Buku ini dapat dipakai sebagai salah satu acuan atau pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur di daerah untuk mengurangi kemiskinan.

Tujuan dari penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) 2008 ini adalah:

- Menjelaskan peraturan dan perundangan terkait dengan pengembangan fasilitas pelayanan umum (infrastruktur).
- Meningkatkan pemahaman mengenai berbagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang penyediaan pelayanan umum.

- Mengemukakan berbagai permasalahan strategis dan solusi pemecahannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang penyediaan fasilitas pelayanan umum.
- Memantapkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, khususnya dalam upaya penyediaan fasilitas pelayanan umum berdasarkan prinsip-prinsip kemitraan.
- Menguraikan kegiatan prioritas 2008 berkenaan dengan fokus pemenuhan standar pelayanan minimum dalam penyediaan fasilitas pelayanan umum di daerah.

Buku Pegangan (*Handbook*) 2008 ini memuat pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 di bidang infrastruktur, dukungan infrastruktur dalam percepatan pembangunan daerah, kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, dan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah yang dianjurkan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur di daerah. Hasil evaluasi atas Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2007, merupakan masukan penyempurnaan untuk penyusunan buku pegangan tahun 2008. Karena itu, dibandingkan dengan buku pegangan tahun 2007, Buku Pegangan (*Handbook*) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2008 relatif lebih baik antara lain lebih rinci.

Adapun hambatan umum yang dihadapi dalam penyusunan Buku Pegangan (*Handbook*) 2008, antara lain: a) kesulitan dalam mendapatkan data dan informasi yang terkini dari Pemda; b) kurangnya koordinasi dengan sektor dan daerah untuk mendapatkan dokumen perencanaan sektor dan daerah; c) terbatasnya waktu pelaksanaan. Upaya antisipasi yang dilakukan dan terus dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang antara lain: a) mendorong pemda untuk membangun data base yang komprehensif, terkini dan diperbaiki secara berkala; b) meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan para *stakeholders*; dan c) pengaturan rencana kerja dan pelaksanaan secara ketat.

5.k. Koordinasi Penataan Ruang

Koordinasi kegiatan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan sosialisasi penataan ruang pada tingkat nasional, daerah dan sektoral dalam rangka memecahkan atau mengurangi konflik pemanfaatan ruang nasional maupun kawasan-kawasan strategis.

Kementerian Negara PPN/Bappenas menjadi salah satu *stakeholders* penting dalam Sekretariat Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional. Mengingat di Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki unit kerja dan SDM dengan latar belakang pendidikan di berbagai bidang pembangunan, maka kementerian/lembaga lain cenderung mengharapkan Kementerian Negara PPN/Bappenas berperan dalam menyiapkan substansi untuk kegiatan-kegiatan koordinasi tata ruang nasional.

Kegiatan tersebut meliputi terselenggaranya forum koordinasi dalam rangka penyelesaian RTRW Provinsi; terselenggaranya forum konsultasi dalam rangka penyelesaian RTRW Kab/Kota; terselenggaranya forum konsultasi dalam rangka penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; terselenggaranya sosialisasi kebijakan penataan ruang; tersedianya media informasi publik untuk pemahaman penataan ruang, terselenggaranya forum koordinasi dalam rangka percepatan penetapan 6 Peraturan Presiden turunan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu RPP tentang Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara dan Penatagunaan SDA Lainnya, RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan, Peraturan Pelaksana UU No. 26/2007, dan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); terselenggaranya forum koordinasi percepatan penetapan Perpres RTR 5 Pulau Besar yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua; terselenggaranya rapat kerja penyusunan agenda kerja tahunan maupun jangka menengah BKTRN.

Berbagai keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan koordinasi penataan ruang nasional antara lain:

- Terciptanya keserasian antara RTRWN, RTRWP, serta RPJM/RPJP
- Terciptanya keserasian antara RTRWP, RTRW Kab/Kota serta RPJM/RPJP
- terselesaikannya konflik pemanfaatan ruang yang bersifat *win win solution*
- Terwujudnya kesepakatan dalam percepatan penetapan PP turunan dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Terciptanya sinkronisasi program dan kegiatan penataan ruang antar berbagai instansi di pusat dan daerah
- Terwujudnya kesepakatan dalam percepatan penetapan Perpres RTR Pulau Besar
- Terwujudnya komunikasi interaktif antara stakeholder tentang kebijakan penataan ruang
- Terwujudnya pemahaman *stakeholders* tentang kebijakan penataan ruang

Dalam kurun waktu tahun 2008 kegiatan-kegiatan tersebut dinilai cukup berhasil walaupun belum dapat terwujud 100 persen. Hal ini disebabkan adanya hambatan utama, yaitu belum semua instansi memiliki perhatian dan mau berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatannya dengan mengacu pada kebijakan tata ruang. Walaupun sudah ada perbaikan pemahaman dibandingkan dengan tahun 2007, namun kinerja pada tahun 2008 masih perlu ditingkatkan kembali yaitu dengan melakukan pertemuan yang lebih intensif membahas permasalahan riil dan mensinkronkan program dan kegiatan K/L dengan kebijakan tata ruang.

5.1. Koordinasi Peningkatan Upaya Mitigasi Dan Pengurangan Resiko Bencana Alam

Dalam rangka koordinasi penanganan bencana alam, Kementerian Negara PPN/Bappenas diberi tugas oleh Presiden dalam menyusun upaya-upaya pengurangan risiko bencana diarahkan melalui pengintegrasian upaya pengurangan risiko bencana ke dalam rencana pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden (*ad hoc*) seperti perhitungan perkiraan kerusakan bencana (*damage Lost assesment/DLA*), penyusunan laporan evaluasi penanganan bencana, dan laporan kejadian bencana.

Target kegiatan tersebut di atas adalah tersusunnya rencana pemulihan di wilayah pasca bencana untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta upaya pengurangan risiko bencana. Selanjutnya, rencana pemulihan tersebut dimasukkan ke dalam RKP sebagaimana dilakukan sejak tahun 2007. Hasil lainnya adalah dimanfaatkannya laporan penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana sebagai input utama dalam pelaksanaan penilaian kebutuhan bagi pemulihan serta perencanaan pemulihan di wilayah pasca bencana oleh kementerian/lembaga terkait seperti Departemen PU, Departemen Perhubungan, BNPB, Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan dalam merencanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Berbagai laporan terkait dengan proses pemulihan pasca bencana dirangkum ke dalam buku pembelajaran yang dimanfaatkan oleh berbagai *stakeholders* yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut, termasuk pembelajaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Indonesia oleh masyarakat, perguruan tinggi, dan NGO. Selain itu, konsep dan pengalaman penanganan bencana di Indonesia dijadikan salah satu acuan penting oleh negara-

negara yang rawan bencana dalam forum-forum internasional yang merupakan kesempatan untuk berbagi ide dan pengalaman dalam penanganan bencana alam.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, kajian dan analisa baik pelaksanaan pemulihan wilayah pasca bencana maupun terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangan terkait penanggulangan bencana yang selanjutnya digunakan sebagai masukan terhadap peningkatan upaya penanggulangan bencana yang lebih baik serta sebagai masukan bagi upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam Rancangan RPJMN 2010 – 2014.

Dibandingkan dengan koordinasi pada tahun 2007, koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam pada tahun 2008 relatif lebih baik. Hal ini mengingat, Kementerian Negara PPN/Bappenas memiliki pengalaman terutama sejak penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam-tsunami di Aceh dan Nias. Sedangkan permasalahan utama yang dihadapi, adalah belum terakomodasinya upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional sebagai sebuah kebutuhan yang riil jika dilihat dari intensitas bencana yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta kondisi geografis Indonesia yang berada pada kawasan rawan bencana baik bencana geologi maupun bencana yang disebabkan perubahan iklim global.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan atau hambatan yang ada tersebut, Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan beberapa langkah antisipatif, yaitu:

- 1) Mendorong pertemuan yang lebih intensif antar anggota BKTRN untuk membangun kesepahaman koordinasi sehingga dapat melakukan tindakan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi kepada daerah provinsi, kabupaten/kota yang membutuhkan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait terutama melalui sosialisasi PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Mendorong segera diselesaikannya penyusunan *grand design* desentralisasi. Penyelesaian *grand design* desentralisasi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bentuk dan tahapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk penataan daerah berserta peran masing-masing para aktor pemerintahan.

- 4) Melaksanakan pertemuan, baik formal maupun informal, secara rutin dalam membahas isu-isu terkait permasalahan sektor dan daerah di masing-masing pulau, dalam rangka penyusunan Prakarsa Strategis Pengembangan Pulau.
- 5) Mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi terkini melalui media informasi yang ada.
- 6) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai bahan acuan untuk mencapai target kegiatan.
- 7) Terkait bencana, langkah antisipatif yang dilakukan yaitu melakukan komunikasi dan koordinasi intensif antar lembaga pemerintah dalam rangka mendorong upaya pengurangan risiko bencana sebagai prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah 2010 – 2014.

Mengingat dengan beban tugas Kementerian Negara PPN/Bappenas di bidang lainnya dan terutama dalam perencanaan pembangunan nasional, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas melakukan pendekatan dan pengaturan kembali agar kegiatan mitigasi dan penanganan bencana dapat dilaksanakan instansi lain yang lebih relevan dengan tupoksinya, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

5.m. Koordinasi Kebijakan Prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sesuai peraturan perundang-undangan, DAK dilaksanakan untuk membiayai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional di daerah tertentu dengan bersumber dari APBN. Prioritas nasional tersebut ditetapkan melalui prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kementerian Negara PPN/Bappenas mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang dan kegiatan prioritas nasional yang akan dibiayai melalui DAK sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKP.

Melanjutkan pengalaman tahun 2007 dan tahun-tahun sebelumnya, maka dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pada tahun 2008 Kementerian Negara PPN/Bappenas berupaya mendorong dilaksanakannya pengalihan secara bertahap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan Kementerian/Lembaga (K/L, sesuai peraturan perundang-undangan), untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui mekanisme DAK agar tidak ada duplikasi dalam pembangunan di daerah.

Adapun permasalahan atau hambatan yang ditemui dalam kegiatan koordinasi strategis lintas wilayah ini antara lain:

- 1) Masih adanya keengganan di beberapa K/L untuk menyerahkan kegiatannya ke daerah
- 2) Belum harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain pada bidang pendidikan, penanganan bencana, dan perencanaan pembangunan daerah.
- 3) Masih banyaknya tuntutan berbagai pihak untuk membentuk daerah-daerah otonom baru. Pada satu sisi, pembentukan daerah otonom baru mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang lebih dekat kepada masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu yang secara geografis terpencil atau sulit aksesnya, namun pada sisi lainnya kehadiran pemerintahan di daerah otonom baru belum secara cepat mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran daerah otonom baru menambah beban APBN terutama terkait dengan upaya melengkapi berbagai sarana dan prasarana serta personil instansi vertikal di daerah.
- 4) Masih banyaknya daerah yang terlambat dalam penetapan APBD sehingga menghambat laju pembangunan daerah masing-masing.
- 5) Selain itu, isu desentralisasi dan otonomi daerah adalah isu yang dinamis serta melibatkan banyak aktor di berbagai tingkat pemerintahan sehingga isu ini menjadi kompleks dan bersifat lintas (sektor dan wilayah).

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan di atas, adalah dengan melaksanakan pembahasan secara formal dan informal dengan berbagai *stakeholders* terkait. Disadari bahwa permasalahan tersebut tidak mungkin dapat diselesaikan sendiri dan dalam waktu singkat. Untuk itu, koordinasi dengan instansi terkait tersebut akan terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

5.n Pengembangan Manajemen Kinerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas

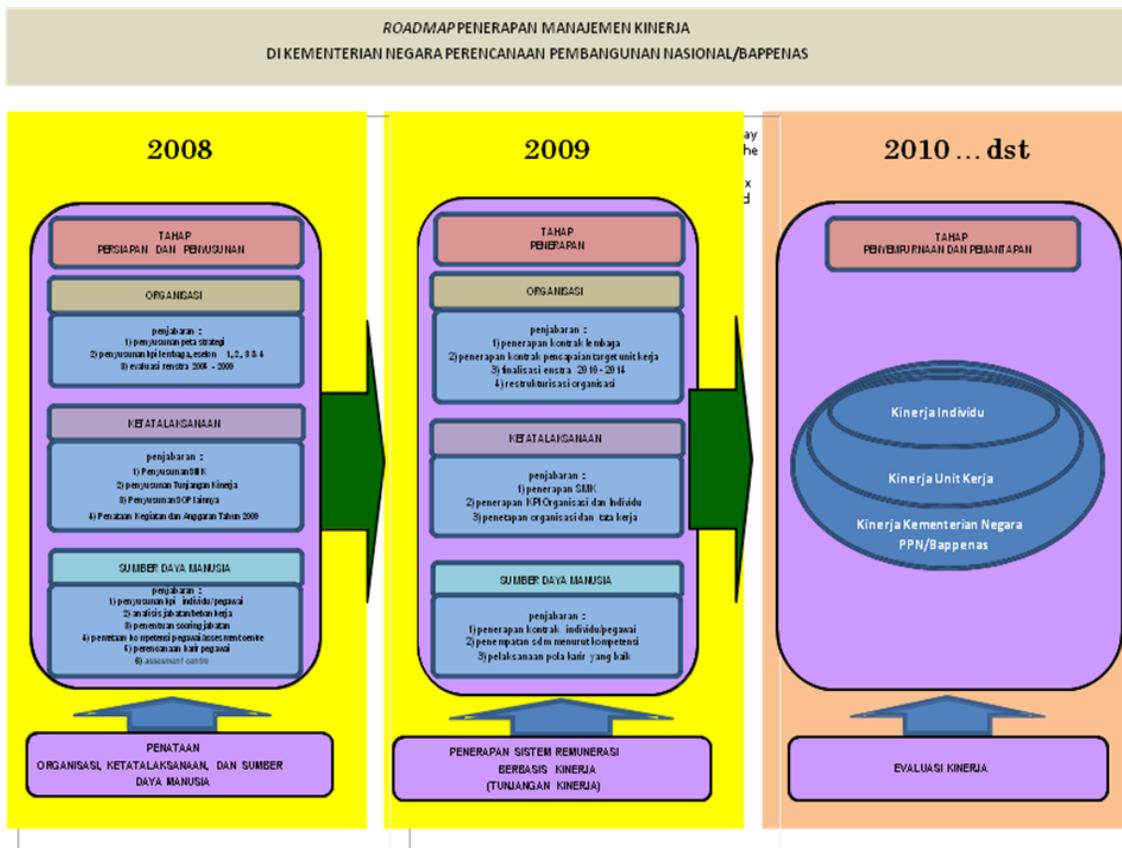
Untuk mendukung berbagai pelaksanaan tugas, Kementerian PPN/Bappenas melanjutkan pengembangan manajemen kinerja, yang mencakup penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia, termasuk penyusunan uraian jabatan dan indikator kinerja utama atau *key performance indicator* sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas. Upaya ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2003/2004 dengan telah disusun dan diedarkannya konsep IKU/KPI unit kerja eselon I dan II kepada para pejabat dan pegawai melalui memorandum yang ditandatangani

Sesmeneg/Sestama dan Inspektur Utama. Namun ketika itu belum mendapat respon yang mengembirakan.

Kemudian pada awal tahun 2008 disusun dua konsep IKU/KPI yaitu mengikuti format yang diatur oleh Peraturan Menpan tahun 2007 tentang IKU/KPI, dan kemudian versi Bappenas dimana terdapat beberapa penyempurnaan dari format K-Menpan. IKU/KPI dalam dua versi atau format tersebut disusun mulai dari IKU lembaga hingga unit kerja eselon II. Selanjutnya, pada akhir tahun 2008 juga telah disusun IKU/KPI dari lembaga hingga eselon IV berikut peta strategi (*strategy map*) dan konsep *balance score card*, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kementerian PPN/Bappenas. Konsep yang terakhir ini mengikuti model yang dikembangkan di Depkeu, BPK dan MA terutama terkait dengan renumerasi baru. Rencana penerapan manajemen kinerja sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada bulan Agustus 2008

Adapun *road map* singkat penerapan manajemen kinerja di Bappenas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1



Pengembangan dan penerapan manajemen kinerja di atas direncanakan selama 3 tahun, dan mulai tahun 2008 hingga 2010, mencakup indikator kinerja utama atau *key performance indicators* (IKU/ KPI) baik untuk lembaga, unit kerja maupun pegawai, uraian jabatan (*job description*), penyusunan berbagai pedoman kerja (SOP), dan konsep sistem remunerasi. Pengembangan manajemen kinerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas tersebut adalah dalam rangka reformasi birokrasi, dan sejalan dengan kebijakan nasional khususnya penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Pengembangan dan penyempurnaan manajemen kinerja tetap akan terus dilakukan setelah tahun 2010.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi adalah kesulitan untuk menentukan format IKU atau KPI, karena sekurang-kurangnya ada 2 versi, yaitu versi Kementerian PAN dan versi Depkeu. Selain itu, kebijakan reformasi birokrasi yang komprehensif masih dalam proses penyelesaian di dalam Tim Reformasi Birokrasi Nasional di Kementerian Negara PAN. Upaya untuk mengatasinya adalah 1) dengan menyusun kedua versi tersebut, dan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang sedang dibahas dalam Tim Reformasi Birokrasi Nasional yang dikordinasikan Menteri Negara PAN; 2) mendiskusikan substansi reformasi birokrasi dengan Tim Reformasi Birokrasi di Kementerian Negara PAN.

A.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran program di atas, terdapat 2 (dua) sasaran yang akan dicapai, yaitu 1) meningkatnya kualitas perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggarannya, dan 2) meningkatnya kualitas kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan lainnya sesuai penugasan Presiden kepada Kementerian Negara PPN/Bappenas, seperti koordinasi strategis yang bersifat lintas bidang/sektoral dan regional/wilayah.

Adapun indikator sasaran kinerja sasaran tersebut adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 28
PENGUKURAN KINERJA SASARAN
PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas perencanaan strategis dan penganggaran pembangunan nasional	% rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2009 dan konsep RPJMN 2010-2014	100 %	80 %	100 %
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	% peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden	90 %	80 %	100 %

A.2.1. Persentase Penyelesaian Rancangan RKP 2010 dan *Background Studies* Penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014

Pada tahun 2008 di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah berhasil mencapai target pencapaian kinerja sasaran tahun 2008 secara penuh (100%). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan nasional, Kementerian Negara PPN/Bappenas berhasil menyusun RKP 2009 dan *background studies* di berbagai bidang pembangunan sebagai bahan atau masukan utama bagi penyusunan Rancangan RPJMN 2010-2014 yang akan dilakukan pada tahun 2009. Dengan tercapainya sasaran dalam penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional pada tahun 2008, maka Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan pencapaian sasaran untuk 2008 sebesar 100%.

Selama pelaksanaan Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas tahun 2005-2009, telah dicapai sasarnya sebesar 15%, meliputi 1) RPJPN periode 2005-2025, 2) RPJMN periode 2005-2009 3) RKP tahunan mulai RKP 2006, RKP 2007, RKP 2008 dan RKP 2009. Sisanya, sebesar 15% akan dicapai pada tahun 2009 berupa penyusunan Rancangan RKP 2010 dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis lainnya di bidang perencanaan pembangunan.

Didalam pencapaian tareget sasaran tahun 2008 tersebut tidak terjadi permasalahan atau hambatan yang dihadapi sehingga pencapaian sasaran dapat memenuhi target dengan baik.

A.2.2 Persentase Kesepahaman Atas Rekomendasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Disamping tugas-tugas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Negara PPN/Bappenas juga telah melakukan berbagai kegiatan koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/pemerintah. Pada tahun 2008, kegiatan koordinasi strategis yang dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas pada umumnya telah berhasil dilaksanakan sebesar 100%. Walaupun dirasakan terdapat hambatan-hambatan, namun dapat diselesaikan dengan baik.

Secara keseluruhan, pencapaian sasaran untuk kegiatan koordinasi strategis selama 4 tahun (tahun 2005 hingga 2008) pelaksanaan Renstra 2005-2009 tersebut telah mencapai sasaran sesuai dengan yang ditargetkan untuk setiap tahunnya. Pencapaian sasaran selama 4 tahun ini tidak dapat dihitung dengan persentase mengingat penugasan koordinasi strategis tidak selalu sama pada setiap tahunnya, ada yang berakhir dan ada juga yang baru dimulai pada tahun ketiga atau keempat seperti koordinasi kebijakan perubahan iklim.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah program untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Kementerian Negara PPN/Bappenas dan unit-unit perencana baik di tingkat pusat dan daerah. Peningkatan kualitas aparatur perencana pada unit-unit perencanaan di tingkat pusat dan daerah bertujuan untuk menghasilkan aparatur perencana yang profesional dalam menyusun rencana pembangunan baik rencana jangka menengah (Renstra) maupun rencana tahunan (Renja) Kementerian/Lembaga maupun daerah/SKPD. Dokumen perencanaan tersebut merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan nasional yang meliputi RPJPN, RPJMN dan RKP.

B.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM di Kementerian Negara PPN/Bappenas maupun untuk pengembangan SDM aparatur perencana di tingkat pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 29
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan SDM aparatur baik ditingkat pusat dan daerah - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP - Penyusunan dokumen pengaturan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana di seluruh Indonesia	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	457 orang	383 orang	83.81 %
		Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	1460 orang	1249 orang	85.84 %
		Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia	7 dokumen	7 dokumen	100 %
2	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, meliputi: : - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan :			
		- Diklat Pimpinan	39 orang	11 orang	28.21 %
		- Diklat Teknis	625 orang	550 orang	88 %
		- Diklat Fungsional	59 orang	18 orang	30.50 %
		- Diklat Prajabatan	40 orang	36 orang	90 %

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan gelar dan non gelar di dalam dan luar negeri bagi aparatur perencana baik ditingkat pusat maupun daerah.

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja kegiatan tahun 2008 pada Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran tahun 2008. Secara umum, kinerja pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia aparatur dinilai relatif berhasil sesuai dengan indikator kinerja *output* yang telah ditetapkan pada awal tahun 2008. Sedangkan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja *outcome* untuk kegiatan tertentu, belum dapat dilaporkan pada LAKIP 2008, karena hasil pengukurannya akan diperoleh tahun 2008 dan dilaporkan dalam LAKIP 2009.

Kegiatan utama program di atas adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) gelar dan non gelar, serta perumusan kebijakan pembinaan jabatan fungsional perencana (JFP) di seluruh instansi perencanaan di Indonesia, pusat dan daerah. Berdasarkan indikator *output*, keberhasilan penyelenggaraan diklat tersebut tercermin dari persentase penyerapan dana dan persentase peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan gelar S2/S3, dan alumni yang telah mengikuti dan lulus diklat non gelar. Dengan persentase pencapaian penyerapan dana sebesar 80,79%, peserta diklat gelar yang berhasil ditempatkan di berbagai perguruan tinggi di

dalam negeri dan di luar negeri berjumlah 518 orang atau 86,05% dari rencana yang ditargetkan; dan alumni yang berhasil menyelesaikan pendidikan S2 atau S3 berjumlah 383 orang atau 83,81% dari rencana yang ditargetkan. Sedangkan jumlah alumni diklat non gelar yang berhasil dicapai berjumlah 1249 orang atau 85,54% dari jumlah yang ditargetkan.

Keberhasilan penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar tersebut juga didukung oleh kegiatan penunjang lain seperti seleksi peserta dan pemantauan yang efektif. Kinerja pendaftaran dan seleksi menunjukkan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sangat baik, yaitu persentase tingkat penyerapan dana 94,03% dengan jumlah peserta yang mengikuti seleksi 2150 orang atau 89,06% dari rencana; dan calon peserta yang berhasil lulus seleksi TPA dan TOEFL dan berhak memperoleh beasiswa sebanyak 518 orang atau 79,45% dari rencana yang ditargetkan. Kegiatan pemantauan diklat gelar dinilai mencapai tingkat kinerja 100%. Kegiatan pemantauan ini telah berhasil memperoleh informasi mengenai kemajuan prestasi belajar peserta, dan mengidentifikasi secara lebih awal mengenai masalah akademik yang dihadapi peserta, dan secepatnya merumuskan tindakan korektif yang diperlukan. Persentase tingkat capaian penyerapan dana kegiatan pemantauan mencapai kinerja 93,69%.

Kirkpatrick (1959), seorang ahli *training evaluation* menyatakan bahwa model evaluasi pelatihan memiliki 4 (empat) tingkat pengukuran, meliputi : (1) *reaction*, mengukur reaksi peserta. Hal apa yang difikirkan dan dirasakan oleh peserta pelatihan tentang pelaksanaan diklat, (2) *learning*, menilai sejauhmana peserta mampu menyerap materi pelatihan berupa pengetahuan dan keahlian, dan berhasil menyelesaikan seluruh proses pembelajaran, (3) *behaviour*, mengukur sejauhmana peserta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, dan menampilkan terjadinya perubahan perilaku, dan (4) *results*, menilai apakah perubahan perilaku peserta tersebut mampu mempengaruhi para *stake-holders*, organisasi dan lingkungannya.

Dengan demikian, untuk menilai kinerja pengelolaan diklat perlu menilai indikator *outcome* agar diperoleh gambaran yang menyeluruh dan menjelaskan manfaat diklat dan implikasi dari berfungsinya *output* yang diperoleh. Dalam hubungan ini, sebagaimana nampak pada Tabel di atas, Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur, masih belum dapat menyajikan data-data realisasi tingkat capaian indikator *outcome*, karena pengukuran kinerja *outcome* untuk kegiatan tahun 2008, baru akan dilakukan pada tahun 2009 ini. Sebagai contoh

untuk menentukan persentase peserta yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan lulus program S2/S3 atau persentase alumni yang ditempatkan kembali pada unit kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya, baru akan dapat dinilai pada tahun 2009 ini, dan dilaporkan pada LAKIP tahun 2009. Untuk itu, akan diambil langkah-langkah antisipatif untuk menjamin bahwa pengukuran indikator *outcome* ini dapat benar-benar dilakukan pada tahun 2009, sehingga hasilnya dilaporkan dan termuat dalam LAKIP 2009.

Lebih jauh, apabila mengacu kepada teori yang dikemukakan Kirkpatrick tersebut di atas, semestinya yang menjadi indikator *outcome* adalah berfungsinya alumni, dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari suatu diklat, ke dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Indikator ini – yang menurut Kirkpatrick dikenal dengan tingkat pengukuran *behaviour* – tidak dapat langsung diukur pada saat selesai diklat (*just in time*), namun memerlukan waktu lebih lama setelah alumni ditempatkan kembali oleh instansi asalnya. Begitu pula indikator manfaat dan dampak hasil pelatihan terhadap kapasitas dan kualitas organisasi – sebagai tingkat pengukuran *results* – akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi, dengan metode pengukuran yang lebih kompleks.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar pada tahun 2008, serta pelaksanaan kebijakan jabatan fungsional perencana antara lain meliputi:

1) Seleksi : Jumlah calon peserta semakin berkurang

Seperti pada Tabel di atas, jumlah realisasi calon peserta penerima beasiswa hanya 2150 orang. Jumlah ini lebih rendah dari jumlah perkiraan sebanyak 2.414 sesuai dengan anggaran kegiatan yang tersedia. Penentuan jumlah calon peserta tersebut didasarkan pada pengalaman selama ini yang menunjukkan kecenderungan penurunan calon peserta. Kekurangan calon peserta, terutama terjadi dari instansi pemerintah daerah di luar Jawa. Bagi calon peserta dari luar Jawa sebenarnya telah dirumuskan kuota dan kriteria seleksi yang berbeda dari daerah lain. Perbandingan jumlah peserta di antara instansi Pusat : Jawa : Luar Jawa ditetapkan dengan komposisi kuota 1 : 3 : 6. Perbandingan tersebut menggambarkan kesempatan menjadi penerima beasiswa lebih besar bagi calon peserta dari luar Jawa, yaitu 60% dari alokasi yang tersedia. Disamping itu, batas lulus Tes Potensi Akademik (TPA) bagi calon peserta dari luar Jawa, juga telah diturunkan dari skor TPA serendah-rendahnya 525

menjadi serendah-rendahnya 500. Skor ini lebih rendah dibanding batas lulus calon peserta dari instansi Pusat (565) dan Jawa (525). Dengan kuota dan batas lulus tersebut, ternyata masih belum mampu meningkatkan jumlah calon peserta yang melamar dan lulus seleksi. Tahun 2008 ini jumlah seluruh pelamar hanya 2150 orang, dan jumlah tersebut tingkat kelulusan seleksi TPA dan bahasa Inggris (TOEFL) hanya mencapai persentase 24,1% (518 dari 2150 orang).

Gagalnya beberapa calon peserta dari luar Jawa yang secara administratif mempunyai status sebagai pegawai vertikal dari suatu instansi pusat, yaitu departemen atau LPND. Di satu pihak, sejak lahir mereka telah berada di luar Jawa dan memiliki karakteristik serta dukungan infrastruktur fisik seperti calon peserta lain di luar Jawa. Namun karena status kepegawaian mereka adalah "pegawai pusat" – dalam hal ini misalnya Balai Penelitian Departemen Kehutanan" – maka mereka diperlakukan sebagai kelompok peserta instansi pusat yaitu dinyatakan "lulus" apabila mampu memiliki skor Tes Potensi Akademik (TPA) sekurang-kurangnya 565. Dengan ketentuan Pusbindiklatren Bappenas seperti itu, menurut mereka hal ini "kurang fair". "Kami sejak lahir dan bekerja sampai saat ini di luar Jawa, seharusnya diperlakukan seperti calon peserta luar Jawa lain, yaitu skor TPA sekurang-kurangnya 500", begitu keluh mereka. Beberapa alternatif solusi untuk masalah ini antara lain : (a) mengubah komposisi kuota. Namun hal ini secara politis harus memperoleh persetujuan DPR agar prioritas terhadap peningkatan kompetensi perencana pemda di luar Jawa tidak berubah; atau (b) aturan batas lulus khusus bagi pegawai instansi pusat yang bekerja di luar Jawa diturunkan. Namun hal ini juga perlu mempertimbangkan potensi kemampuan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pendidikan jenjang S2 dan S3; atau (c) dibuat kelompok lain yang mengakomodir kelemahan ini, misalnya kelompok ke-empat, yaitu : kelompok pegawai instansi pusat di luar Jawa. Dalam hal ini perlu ditentukan siapa yang mengusulkan, instansi pusat di Jakarta atau Kanwil/Balai tempat mereka bekerja di daerah? Kebijakan kriteria seleksi tahun 2008 telah diubah dengan batas lulus TPA untuk calon peserta instansi pusat yang bekerja di Luar Jawa menjadi sekurang-kurangnya 525. Dengan kriteria tersebut, telah berhasil meningkatkan proporsi calon dari luar Jawa yang pada tahun 2007 mencapai 39% menjadi 41%, dengan perincian dari instansi luar Jawa 31% dan instansi pusat luar Jawa 10%.

2) Proporsi asal peserta.

Komposisi perbandingan instansi asal dari peserta diklat dalam 2 tahun terakhir ini masih belum mampu dipenuhi. Hasil seleksi tahun 2007 menunjukkan perbandingan prosentase instansi pusat, pemda di Jawa dan pemda di luar Jawa sebesar 20% : 41% : 39%. Sedangkan hasil seleksi tahun 2008 menunjukkan proporsi instansi Pusat : Jawa : Luar Jawa : Pusat-Luar Jawa sebesar 30% : 29% : 31% : 10%. Berdasarkan hal tersebut, nampak jumlah peserta dari pemda di luar Jawa masih jauh dari harapan, yaitu 60%. Padahal aturan tentang komposisi tersebut di atas merupakan komitmen Bappenas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 yang meminta Bappenas – sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenas – untuk sungguh-sungguh memberikan prioritas pada peningkatan kemampuan perencana pemda di luar Jawa.

Beberapa faktor penyebab rendahnya minat dan tingkat kelulusan seleksi ini ditengarai adalah: (1) rendahnya kualitas sistem perekrutan pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; (2) ketentuan syarat masa kerja PNS yang ditetapkan pemerintah daerah; (3) status kepegawaian calon peserta instansi pusat tapi bekerja di wilayah luar Jawa; (4) latar belakang pendidikan S1, dan (5) terbatasnya dukungan pembiayaan.

Saat ini, di dalam sistem rekrutmen PNS di daerah, masih terjadi proses yang tidak objektif, tidak terbuka dan sarat dengan praktek-praktek nepotisme. Akibatnya, ketika PNS yang memiliki kualitas baik dan mampu lulus TPA dan TOEFL sudah habis terseleksi dalam beberapa kali periode seleksi beasiswa, maka lambat laun akan semakin sulit menemukan calon peserta yang berkualitas, memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, dan belum memperoleh kesempatan memperoleh beasiswa Bappenas.

Adapun upaya penyelesaiannya adalah dengan menyarankan dan mendiskusikan permasalahan tersebut dengan Pimpinan instansi/Pemerintah Daerah agar rekrutmen peserta diklat dapat lebih baik dan mampu mengikuti program diklat gelar yang diselenggarakan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Hal ini dilakukan dalam berbagai kesempatan, antara lain melalui surat dan rapat-rapat koordinasi diklat.

3) Terdapat Peraturan Pemerintah Daerah yang Mesyaratkan Masa Kerja PNS Lebih Lama.

Persyaratan masa kerja bagi calon peserta ditetapkan oleh Bappenas, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun masa kerja di dalam status PNS 100%, pendidikan S1, dan golongan/pangkat IIIA. Beberapa pemerintah daerah tertentu menerapkan ketentuan – biasanya melalui peraturan Gubernur atau Bupati/Walikota – yang mensyaratkan masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Akibatnya beberapa calon peserta yang telah lulus seleksi Bappenas, tidak memperoleh ijin tugas belajar, karena belum mencapai masa kerja yang dipersyaratkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta dan pimpinan instansi pemda secara informal diperoleh beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab menurunnya jumlah calon peserta tersebut, yaitu : (a) terjadi perbedaan aturan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat gelar. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di beberapa pemda ada yang menerapkan aturan bahwa pegawai yang dapat dikirim ke Bappenas masih didasarkan urutan senioritas golongan pangkat yaitu golongan IIIC. Sedangkan golongan yang disyaratkan Bappenas hanya setingkat golongan IIIA; (b) BKD di beberapa pemda juga seringkali tidak memiliki keinginan untuk meneruskan informasi yang diterima dari Pusbindiklatren Bappenas kepada pegawainya; (c) ada kecenderungan pegawai pemda lebih berorientasi kepada jabatan yang dipangkunya selama ini dibanding kesempatan untuk meningkatkan tingkat pendidikan; atau (d) kegiatan sosialisasi yang selama ini dilakukan Pusbindiklatren kurang efektif.

Adapun solusi yang sedang dilakukan juga untuk permasalahan nomor 3 diatas adalah mengubah ketentuan tentang perbandingan kuota dan kriteria peserta tersebut, dengan mempertimbangkan pula aspek-aspek : (a) keadilan bagi peserta lain dan (b) kemampuan peserta yang sebenarnya dan mencerminkan potensi untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Aspek kedua tersebut menjadi sangat penting bagi Pusbindiklatren Bappenas, untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang diperuntukkan bagi calon peserta yang benar-benar potensial dan diperkirakan mampu menyelesaikan pendidikan pasca sarjana S2 atau S3. Hal ini terus didiskusikan dengan beberapa pemerintah daerah.

4) Masalah Penempatan Kembali Peserta Diklat Gelar

Para peserta diklat gelar sering mendapat penugasan/penempatan kembali di instansi lain yang berbeda (bukan di Bappeda) dengan bidang ilmu S2 atau S3-nya, sehingga pemanfaatan pegawai tersebut menjadi tidak optimal.

Upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan menyampaikan surat pengembalian dari Sekretaris Menteri Negara PPN/Sestama Bappenas kepada setiap pimpinan instansi asal, yaitu Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian instansi. Isi surat tersebut disamping menyatakan bahwa alumni telah menyelesaikan pendidikan gelar S2/S3, juga menghimbau agar yang bersangkutan ditempatkan di unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan latar belakang studi S2/S3-nya. Disadari bahwa himbauan tersebut kurang kuat, namun hal itu yang saat ini maksimal dapat dilakukan mengingat Kementerian Negara PPN/Bappenas tidak memiliki kewenangan atau akses untuk mengintervensi kebijakan dan pelaksanaan penempatan pegawai pemerintah daerah. Namun demikian, apabila pimpinan instansi pemerintah daerah memiliki komitmen tinggi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan mendasari pengembangan karir pegawai dengan kesesuaian kompetensi, maka pimpinan instansi asal peserta dapat bersinergis dengan tujuan diklat PNS dengan memanfaatkan alumni beasiswa Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan cara menempatkannya di instansi atau unit kerja yang tepat.

5) Pelaksanaan jabatan fungsional perencana belum efektif.

Secara umum berbagai peraturan JFP yang sudah diterbitkan melalui Juklak dan Juknis JFP, dinilai masih belum efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat/Propinsi/ Kota/Kabupaten. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikasi hasil pemantauan seperti: (a) sebagian besar perencana dan instansi perencanaan menyatakan belum mengetahui keberadaan JFP, (b) sebagian besar instansi perencanaan yang belum melaksanakan *inpassing*, dan (c) sebagian besar instansi belum membentuk Tim Penilai JFP instansi meskipun sangat paham terhadap juknis pembentukan Tim Penilai.

Kendala yang merupakan penyebab belum efektifnya pelaksanaan JFP sebagian besar karena: (a) belum adanya peraturan tunjangan JFP, (b) jabatan fungsional masih dianggap tidak prestisius atau jabatan buangan, (c) fasilitas instansi dan dukungan atasan langsung

lebih banyak diberikan kepada jabatan struktural dan (d) pengurusan penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat dianggap sulit dan *complicated*. Disamping itu, salah satu implikasi kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yaitu pengembangan wilayah atau pembentukan pemerintah Kota dan Kabupaten baru telah menyebabkan (e) masih diperlukannya penambahan PNS dan pengisian jabatan struktural, sehingga jabatan fungsional, khususnya JFP menjadi tidak populer.

Upaya yang sedang dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menyusun penyempurnaan kebijakan mengenai JFP secara proporsional dan mendiskusikannya dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Selain itu, juga dilakukan penyebaran informasi JFP melalui sosialisasi yang dilakukan Bappenas kepada instansi dan unit-unit kerja perencanaan di K/L dan Pemda.

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas

Pada tahun 2008, telah dilaksanakan berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk para pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas, seperti Diklat Pimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Prajabatan. Kesemuanya dikoordinasikan oleh Biro Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, target yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai dengan baik. Tingkat pencapaian dua target di atas adalah 80% dapat dianggap cukup berhasil, sedangkan dua target lainnya kurang berhasil, hanya mencapai di bawah 40%. Kondisi ini disebabkan: a) pegawai yang bersangkutan tidak memperoleh ijin dari atasan langsung; b) calon peserta enggan mengikuti diklat dengan berbagai alasan; dan c) bagi pejabat fungsional perencana (JFP) tidak mampu mengumpulkan dokumen untuk memperoleh sejumlah angka kredit yang diminta sebagai jumlah angka kredit minimal untuk dapat mengikuti diklat JFP yang dipersyaratkan; d) pegawai mengikuti diklat bukan atas kemauannya, tetapi hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Biro SDM sehingga merasa tidak nyaman; e) Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan diklat yang kebutuhan pegawai yang bersangkutan, sehingga cenderung menolak ikut diklat; f) pada saat mengikuti diklat, pegawai sering mendapat tugas lain dari atasannya, sehingga mengganggu konsentrasi pegawai dalam mengikuti diklat.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, akan terus dilakukan beberapa upaya, sebagai berikut:

1) Peningkatan efektifitas penyelenggaraan diklat.

Beberapa alternatif solusi yang disarankan antara lain : (a) melakukan pemetaan jumlah pegawai di pemerintah daerah yang diperkirakan berpotensi dan mampu memenuhi persyaratan beasiswa Kementerian Negara PPN/Bappenas; (b) mengirimkan surat penawaran dilampiri dengan *booklet* atau buku pedoman lengkap tentang ketentuan dan prosedur penyelenggaraan diklat gelar Pusbindiklatren Bappenas; atau (c) melakukan sosialisasi secara lebih intensif.

Beberapa solusi yang disarankan tersebut perlu juga didukung oleh langkah-langkah kerjasama Kementerian Negara PPN/Bappenas dan instansi asal yang lebih intensif melalui : (a) membangun komitmen instansi perencanaan para pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, terhadap penyelenggaraan diklat gelar dan non gelar, sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur perencana; (b) melakukan berbagai sosialisasi dalam berbagai forum perencanaan, agar diperoleh pemahaman bahwa pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perencana tidak terlepas dari tujuan peningkatan kapasitas institusi, dalam lingkup dan metode *capacity building approach*, dan (c) mendorong instansi asal peserta untuk menentukan berbagai ketentuan dan peraturan yang mendukung kemudahan : (i) bagi calon peserta mengikuti seleksi beasiswa dan (ii) bagi alumni untuk memperoleh penempatan kembali di unit-unit kerja yang sesuai dengan kemampuan dan latar belakang studi.

2) Peningkatan efektifitas pelaksanaan JFP

Dalam jangka pendek (tahun 2009) Kementerian Negara PPN/Bappenas berupaya; (a) meningkatkan koordinasi dengan Sekneg, Kantor Menpan, BKN dan Departemen Keuangan, untuk mempercepat proses penerbitan Keppres tentang tunjangan JFP, termasuk kepastian pembebanan biaya tunjangan JFP untuk Pemerintah Propinsi, Kota dan Kabupaten (b) melaksanakan Evaluasi terhadap data hasil pemantauan perlu diperdalam melalui berbagai kegiatan kajian, diskusi atau lokakarya, dengan tujuan: (a) menemukan permasalahan atau kendala yang merupakan faktor pengaruh terhadap efektif-tidaknya pelaksanaan JFP, (b)

menyiapkan bahan-bahan penyempurnaan peraturan pelaksanaan JFP yang diperlukan, baik yang terkait dengan substansi: paradigma, prinsip, dan tujuan keberadaan JFP, maupun terkait dengan mekanisme pelaksanaan JFP. Evaluasi ini disamping akan melibatkan para *stakeholder JFP* dari kalangan birokrasi, juga perlu didukung oleh akademisi, ahli dan praktisi dalam bidang perencanaan dari perguruan tinggi, dan asosiasi perencana, (c) Bappenas sebagai instansi Pembina JFP, perlu melakukan diversifikasi cara-cara penyebaran informasi yang memiliki jangkauan diseminasi yang lebih luas (baik kepada PNS yang berminat maupun dinas-dinas sektoral), melalui berbagai forum sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi di instansi perencanaan di seluruh Indonesia dan (d) Peningkatan intensifikasi peran Pusbindiklatren Bappenas sebagai: pusat data dan informasi JFP, pusat kajian dan pengembangan JFP, pusat pelayanan dan komunikasi perencana dalam bentuk: pengelolaan *website*, penerbitan majalah, pelayanan perpustakaan, penyelenggaraan *workshop*, seminar dan lokakakarya.

Dalam jangka menengah (tahun 2010 – 2014), Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai Instansi pembina JFP, akan melakukan berbagai kajian komprehensif mengenai pengembangan kapasitas instansi perencanaan dengan fokus: (a) studi jabatan fungsional sebagai upaya peningkatan profesionalisme PNS, (b) studi efektifitas pengembangan jabatan fungsional dalam rangka *downsizing* struktur organisasi birokrasi, (c) studi tentang penyetaraan tugas, fungsi dan dukungan fasilitas jabatan fungsional dan jabatan struktural di lingkungan instansi pemerintah, dan (d) evaluasi dampak pelaksanaan JFP terhadap peningkatan kualitas *output* dan produktivitas instansi perencanaan.

3) Kajian yang terkait dengan Pola Karir Jabatan Fungsional

Diperlukan kajian yang terkait dengan Pola Karir Jabatan Fungsional dengan fokus: (a) studi validitas pengukuran prestasi kerja melalui penilaian angka kredit, (b) studi kecocokan pola karir perencana *competency based development* dengan karakteristik instansi perencanaan, dan (c) studi penggunaan *merit system* dalam pelaksanaan jabatan fungsional perencana, baik di instansi pemerintah di pusat maupun di daerah.

B.2 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur manusia aparatur, terdapat 2 sasaran yang akan dicapai : 1) meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kementerian Negara PPN/Bappenas; 2) meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di instansi lain di di pusat dan daerah.

Adapun pengukuran pencapaian kinerja sasaran tersebut adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini :

<p style="text-align: center;">Tabel 30 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR</p>					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah.	% alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3.	80 %	0 %	0 %
		% alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah.	80 %	0 %	0 %
		% alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %	0 %	0 %
		% alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %	0 %	0 %
2	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Negara PPN/ Bappenas.	% perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %	0 %	0 %
		% pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %	0 %	0 %
		% penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %	0 %	0 %

Sebagaimana pada Tabel di atas dapat dijelaskan hasil pencapaian masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

B.2.1. Prosentase alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang gelar (S2/S3) dan prosentase alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah

Pencapaian sasaran diatas belum dapat dilakukan, mengingat data yang belum diperoleh belum lengkap dan baru akan diperoleh pada tahun 2009. Untuk memperoleh data di atas, khususnya untuk sasaran kedua, diperlukan survey atau evaluasi selama setahun sejak peserta diklat ditempatkan atau bekerja kembali di pemerintah daerah. Disadari bahwa data sasaran kedua tersebut relatif sulit dan memerlukan waktu relatif lama, namun hal tersebut tetap perlu dilakukan untuk melihat *outcome* atau dampak dari keikutsertaan pegawai dalam diklat perencanaan pembangunan.

B.2.2. Prosentase alumni pegawai merasakan relevansi diklat pegawai dalam meningkatkan kompetensi pegawai Bappenas dan Prosentas penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat

Pencapaian sasaran diatas belum dapat dilakukan pada tahun 2008 tetapi baru terlihat pada tahun 2009. Namun secara kualitatif, dapat disampaikan bahwa banyak pimpinan unit kerja eselon I dan II yang menyatakan adanya peningkatan kompetensi bawahannya yang telah mengikuti diklat.

Beberapa permasalahan yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran bagi pegawai yang telah mengikuti diklat sehingga tidak merasakan relevansi diklat pegawai dalam meningkatkan kompetensinya adalah (1) pegawai mengikuti diklat bukan atas kemauannya, tetapi hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh Biro Sumber Daya Manusia; (2) Diklat yang diikuti tidak sesuai dengan diklat yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pegawai tersebut, sehingga tidak mendapat tanggapan yang positif; (3) Dalam menjalankan diklat kadang-kadang pegawai tersebut mendapat tugas lain dari atasannya, sehingga akan mengganggu konsentrasi pegawai dalam mengikuti diklat.

Hal-hal yang sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja sasaran 2 tersebut di atas, adalah: (1) peserta diklat adalah pegawai yang memang ingin atau berminat mempelajari ilmu yang akan diajarkan dalam diklat; (2) pelaksanaan diklat harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan tugas pegawai, sehingga pegawai dapat mengikutinya

dengan penuh antusias; (3) pejabat eselon I dan II atau atasan langsung dihimbau agar tidak memberikan tugas kepada pegawai yang sedang mengikuti diklat.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara adalah program untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas dibidang penyediaan sarana dan prasarana Kantor termasuk dalam penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, meliputi pengadaan peralatan dan pendukung kerja serta pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan termasuk peningkatan pengelolaan aset manajemen.

C.1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 31 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	70 %	90 %	129 %
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	1 Dokumen	1 dokumen	100 %
3	Menyediakan kelengkapan data/informasi yang diperlukan	% Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %	50%	72 %

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi kegiatan nomor 1,2, dan 3 secara garis besar sudah mencapai target 70 %. Pencapaian keberhasilan kegiatan menyempurnakan manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/Bappenas. melewati target yaitu sebesar mencapai 129%. Pencapaian keberhasilan tersebut diatas, dibuktikan dengan antara lain telah terbitnya Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas No. 004/M.PPN/10/2008 tentang Pengelolaan Pelaksanaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Begitu juga dengan pelaksanaan kegiatan menyempurnakan manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan telah tercapai dan berhasil dilaksanakan 100 %, sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak demikian dengan kegiatan menyediakan kelengkapan data/Informasi yang diperlukan, hanya mencapai target 72 %. Hal ini disebabkan oleh penyempurnaan sistem manajemen merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 periode atau baru akan terlihat pencapaiannya pada akhir tahun 2009.

C.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pada program peningkatan sarana dan prasana terdapat sasaran yang akan dicapai 1) menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai dan 2) kemudahan akses dan ketersediaan data/informasi dan teknologi informasi mutakhir untuk mendukung perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional. Hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur sebagaimana pada tabel di bawah ini :

<p style="text-align: center;">Tabel 32 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</p>					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	% sarana dan prasaran serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang tersedia dengan baik	70%	45 %	80 %
2	Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik	60 detik	12.5 %

Berdasarkan tabel di atas, sasaran yang ditargetkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pegawai, baru terealisasi sebesar 80 %, sedangkan untuk sasaran kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir hanya sebesar 12.5 %. Seluruh pelaksanaan kegiatan mendukung penyediaan fasilitas kantor belum berhasil dilaksanakan secara keseluruhan mengingat keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas kerja sesuai kebutuhan pegawai. Penyebab ketidakberhasilan sasaran kedua untuk ketepatan waktu yang diinginkan dalam mengakses data dan informasi perencanaan pembangunan belum berhasil dicapai dari target yang ditetapkan

yaitu 5 detik per akses data/informasi. Dalam pelaksanaannya data dan informasi dapat terakses melalui sistem yang tersedia mencapai rata-rata 60 detik. Hal ini disebabkan masih dalam proses pengembangan sistem baru, yang dapat terlihat secara keseluruhan pada tahun 2009.

Permasalahan penting yang dihadapi Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mencapai sasaran tersebut hingga saat ini antara lain keterbatasan ruang kantor dan tempat parkir sehingga pegawai tidak mempunyai fasilitas ruang kerja yang layak sesuai dengan standar ruang menurut jabatan pegawai. Hal ini juga mengakibatkan para tamu yang datang ke Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam rangka berkoordinasi atau menghadiri rapat tidak dapat meletakkan kendaraanya di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. Upaya mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2006 telah direncanakan akan dibangun gedung dan sarana parkir dengan menggunakan lahan yang memang sudah terbatas. Namun rencana ini dibatalkan, karena kondisi ekonomi yang tidak kondusif untuk membangun gedung dan ruang parkir tersebut sehingga beberapa alternatif solusi adalah mengatur ruang kerja kembali dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait mengenai kekurangan lahan perparkiran.

D. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

Program penerapan kesempatan pemerintahan yang baik adalah program untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas dibidang pelayanan umum yang meliputi pelayanan penggajian, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor serta pendukung lainnya.

D.1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan pada program penerapan pemerintahan yang baik sesuai dengan pencapaian kinerja kegiatan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 33
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008
PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100 %	90%	90%
2	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan pelayanan umum untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	100 %	100%	100%
3	Menyempurnakan manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas	% peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas	100 %	75%	93%

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah berupaya melakukan peningkatan pelayanan umum melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kementerian Negara PPN/Bappenas, telah memberikan pelayanan yang optimal melalui manajemen atau pengelolaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

Secara umum, manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai sudah mencapai pelayanan sebesar 90%. Manajemen atau pengelolaan terhadap pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sudah dilaksanakan dengan sangat baik beberapa perbaikan dalam manajemen pembayaran gaji dan pegawai adalah adanya perbaikan sistem pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan satu sistem pembayaran melalui perbankan dan tidak lagi melalui cara manual, yaitu pengambilan di loket kasir. Untuk tahun berikutnya, direncanakan kualitas manajemen pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium dapat dilakukan secara optimal dengan melakukan perbaikan lainnya agar dapat dilakukan secara tepat waktu (100%). Disamping itu, juga telah dilakukan pengembangan manajemen melalui sistem pelayanan yang lebih baik, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem perpajakan pegawai. Sistem tersebut dapat memudahkan pegawai untuk mengetahui informasi tentang seluruh pajak yang dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Perpajakan, Departemen Keuangan. Keseluruhan manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan telah dilaksanakan lebih efektif dan efisien serta telah mencapai keberhasilan yang memuaskan.

2. Manajemen atau pengelolaan pelayanan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai

Untuk mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai telah dilakukan perbaikan manajemen atau pengelolaannya. Adapun perbaikan manajemen atau pengelolaan tersebut adalah penataan gedung dan ruang kerja serta fasilitas pendukung lainnya, mendukung mobilitas pelaksanaan kegiatan pimpinan, pemeliharaan dan perbaikan sasaran dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas antara lain sistem absensi pegawai melalui *sistem finger scan*, Keseluruhan manajemen atau pengelolaan pelayanan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai lembaga atau pegawai telah dilaksanakan dengan baik serta telah mencapai keberhasilan yang memuaskan.

3. Manajemen atau pengelolaan keuangan Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas

Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan Negara melalui penataan manajemen atau pengelolaan keuangan Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas telah dilakukan berbagai pelaksanaan kegiatan, meliputi pengembangan sistem pengelolaan aset-aset milik Kementerian Negara PPN/Bappenas, meningkatkan kinerja dalam proses verifikasi pengelolaan anggaran termasuk dalam pencairan anggaran. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan adalah menyusun panduan mekanisme perencanaan kegiatan dan pengelolaan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja dalam menyusun rencana kegiatan dan anggarannya serta pelaksanaan oleh pengelola anggaran.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan manajemen atau pengelolaan pelayanan secara umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas adalah: 1) masih kurangnya pengawasan secara rutin dalam memonitor pemanfaatan seluruh fasilitas-fasilitas yang tersedia sehingga bisa membuat kurang nyamannya; dan 2) perlunya perluasan lahan di gedung Kementerian Negara PPN/Bappenas khususnya lahan parkir dan ruangan kerja. Untuk itu, akan terus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) peningkatan pengawasan yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik; 2) melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pemerintah DKI dalam pemanfaatan lahannya yang letaknya tidak jauh dari Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas, namun untuk ke depan perlu diusulkan penambahan ruang kerja dan lahan parkir yang lebih luas mengingat tingginya intensitas kegiatan koordinasi Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan instansi terkait lainnya baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga asing.

D.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pada program peningkatan sarana dan prasana terdapat 1 sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan umum. Adapun hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran pada program penerapan pemerintahan yang baik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 34 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008 PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	% peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas	90 %	85%	85%

Secara umum pencapaian pengukuran sasaran terhadap indikator yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sangat baik dan berhasil. Adapun realisasi pencapaian atas target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut 1) untuk kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai baru mencapai keberhasilannya sebesar 85% dari target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya sasaran tersebut disebabkan adanya faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi berkurangnya pencapaian target tersebut; 2) untuk kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong kinerja lembaga dan pegawai baru mencapai keberhasilannya sebesar 85%. Belum tercapainya sasaran tersebut disebabkan keterbatasan *resources* yang ada; 3) untuk kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan Negara baru mencapai keberhasilannya sebesar 70%. Belum tercapainya sasaran tersebut disebabkan faktor-faktor eksternal antara lain keterkaitan instansi terkait seperti Departemen Keuangan dalam mendukung tercapainya kelancaran proses pengelolaan keuangan Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas.

E. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara (PPAAN) diarahkan untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Program ini

dilaksanakan oleh dua unit kerja eselon II, yaitu Inspektorat Bidang Administrasi Umum (IBAU) dan Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan (IBKK).

E.1. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Pada tahun 2008, inspektorat semakin meningkatkan intensitas fungsi penyediaan jasa konsultasi (*consulting*), antara lain berupa seminar ketaatan, layanan informasi tiap saat (*help desk*) dan pelatihan. Pelaksanaan fungsi ini mendapat sambutan antusias dari seluruh unit kerja. Hal ini merupakan indikator adanya kebutuhan yang besar terhadap jasa konsultasi yang terkait dengan ketaatan pada peraturan dan *good governance*. Untuk itu, perlu dilakukan perkuatan fungsi *consulting* sejalan dengan paradigma audit internal, tidak lagi semata-mata sebagai *watchdog* melainkan lebih menjadi katalisator. Inspektorat perlu lebih mengedepankan fungsi pencegahan daripada penindakan. Audit tahap perencanaan (*pre audit*) mendapat prioritas lebih tinggi dibanding audit setelah kegiatan (*post audit*).

Penajaman fokus inspektorat ke arah *consulting* tidak berarti meninggalkan fungsi *assurance*, yaitu memberi jaminan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif dengan mematuhi aturan. *Assurance* yang merupakan fungsi dasar unit pengawasan, dilaksanakan inspektorat dalam kegiatan pemeriksaan operasional, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Adapun target pencapaian pelaksanaan kinerja kegiatan pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara sebagaimana Tabel di bawah ini.

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
1	Pemeriksaan Keuangan dan Kinerja Tupoksi Kelembagaan yang Dihilkan pada Tahun 2008.	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008.	8 LHP	8 LHP	100 %
2	Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.	Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan.	40%	30%	75 %
3	Pengembangan atau Penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen	Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen	4 Masukan	8 Masukan	100 %

<p style="text-align: center;">Tabel 35 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA</p>					
NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	TARGET	REALISASI	%
4	Identifikasi Peraturan yang Bermasalah dalam Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Tupoksi Kelembagaan.	Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan.	6 buah	6 buah	100 %
5	Reviu atas Laporan Keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	4 Lap	4 Lap	100 %
6	Seminar Ketaatan	Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	100%

Pencapaian kinerja kegiatan dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat preventif atau pencegahan dan represif yaitu usulan penindakan atas kesalahan pegawai, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan

Kegiatan pemeriksaan keuangan dan kinerja kelembagaan pada tahun 2008 telah dilakukan sebanyak 8 kali atau menghasilkan sebanyak 8 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari 8 LHP tersebut, 2 LHP terkait pemeriksaan audit kajian TA 2007 dan pemeriksanaan audit manajemen tupoksi unit kerja yang dilakukan IBKK sedang sisanya 6 LHP merupakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan IBAU. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan mengenai pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008, telah mencapai realisasi 100 % sesuai target yang direncanakan. Kegiatan pemeriksaan yang sudah terlaksana adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan terhadap PPK Sesmeneg/Sestama Bappenas TA 2007.
- 2) Pemeriksaan terhadap PPK Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) TA 2007.
- 3) Pemeriksaan terhadap PPK Program P2MPD TA 2007.
- 4) Pemeriksaan terhadap PPK Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bappenas TA 2007.
- 5) Pemeriksaan terhadap PPK Kedeputian Bidang Pendanaan TA 2007.
- 6) Pemeriksaan terhadap kegiatan Pusat Pengembangan Data dan Informasi TA 2007.

- 7) Pelaksanaan Audit Kinerja Program/Kegiatan untuk kegiatan Kajian Isu Strategis dan Prakarsa Strategis terhadap 38 UKE II dan 5 UKE I TA 2007
- 8) Pelaksanaan Audit Manajemen Tupoksi terhadap Biro Renortala.

2. Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Keuangan Dan Pelaksanaan Tupoksi Kelembagaan.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut atas temuan-temuan pemeriksaan Inspektorat, BPK dan BPKP.

- 1) Tindak lanjut rekomendasi temuan Audit Manajemen Tupoksi TA 2007 belum dapat terlaksana secara maksimal
- 2) Sehubungan dengan temuan BPK pada tahun 2008, telah ditindaklanjuti antara lain berupa pembenahan pengelolaan aset dan penertiban tata laksana pinjaman dan hibah luar negeri.
- 3) Berkenaan dengan temuan BPKP, telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan BPKP di 7 (tujuh) wilayah yaitu Propinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Riau dan Bengkulu. Keseluruhan tindak lanjut sebesar Rp. 96,6 juta sedangkan yang dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp. 421,9 juta. Dengan demikian saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sebesar Rp.68,9 juta. Saldo tersebut telah jauh berkurang dibanding tahun 2006 yang sebesar Rp.2,2 milyar.

3. Pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen.

Pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen merupakan hasil pemeriksaan. Temuan yang merupakan hasil penilaian bukti atau kriteria, selanjutnya ditelaah. Penelaahan temuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab. Untuk mencegah terjadinya temuan berulang, inspektorat mengajukan usulan perbaikan sistem pengendalian manajemen. Usulan-usulan tersebut diharapkan memperkecil kemungkinan terjadinya faktor penyebab. Selama tahun anggaran 2008 telah dikirimkan usulan perbaikan sebanyak 4 (empat) usulan rekomendasi sesuai target. Usulan tersebut adalah rencana aksi perbaikan laporan keuangan, penerapan kontrak harga satuan untuk kajian, perangkapan jabatan antara PPK dan Kabag verifikasi dan penyusunan standar format kontrak kerja dengan pihak III.

4. Identifikasi Peraturan yang Bermasalah dalam Pengelolaan Anggaran dan Pengelolaan Tupoksi Kelembagaan.

Temuan penyimpangan terhadap ketentuan terjadi karena kurangnya pemahaman atas peraturan, karena faktor kesengajaan dan dapat juga terjadi karena kurang sempurnanya peraturan sehingga sulit untuk dilaksanakan. Berangkat dari kesadaran tersebut inspektorat melakukan beberapa telaah atas aturan-aturan terkait dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tupoksi dan mengusulkan perbaikan kepada instansi yang terkait. Selama tahun 2008 telah dilakukan identifikasi atas 6 peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan yaitu:

- Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor:004/M.PPN/ 09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Biaya di Kementerian Negara PPN/Bappenas
- Peraturan Menneg PPN/ Kepala Bappenas Nomor PER.08/M.PPN/12/2006 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.
- S.E. Bersama Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas : 1203/D.II/03/2000 Dan Dirjen Anggaran Depkeu Nomor SE-38/A/2000, Tanggal 17 Maret 2000, Tentang Petunjuk Penyusunan RAB Untuk Jasa Konsultasi, Peraturan
- PP 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

5. Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB

Dalam rangka melaksanakan fungsi *assurance*, inspektorat melakukan penelaahan atas laporan keuangan sebelum laporan keuangan ditandatangani oleh menteri. Hal yang sama juga dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang direviu sebelum laporan disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sedangkan reviu atas TOR dan RAB (audit perencanaan atau pre audit) dilakukan dengan tujuan agar perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun anggaran 2008, telah diterbitkan sebanyak 1 laporan reviu atas laporan keuangan, 1 laporan reviu atas LAKIP, dan 2 laporan reviu atas TOR/RAB.

Ditinjau dari daya tanggap tindak lanjut, reviu atas laporan keuangan adalah reviu yang paling cepat dan komprehensif tindak lanjutnya. Ini memberi kontribusi bagi peningkatan kualitas laporan keuangan. Meskipun masih tetap Wajar Dengan Pengecualian, catatan kualifikasinya yang semula dua (permasalahan aset dan Hibah) pada tahun 2008 tinggal satu yaitu aset.

Pada urutan berikutnya reviu TOR/RAB mendapat respon yang cukup memadai. Proses ini diyakini meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Beberapa unit kerja yang lalai dalam tindak lanjut tidak akan luput menjadi temuan pada saat post audit. Proses reviu LAKIP pada tahun 2008 belum mendapat respon dan tindak lanjut memadai. Akibatnya peringkat LAKIP Bappenas masih jauh dari harapan.

6. Seminar Ketaatan

Seminar ini merupakan media berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) yang diikuti oleh seluruh unit kerja, PPK, dan inspektorat. Media ini sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi terhadap aturan dan pelaksanaannya. Unit kerja dan PPK juga berbagi pengalaman terbaik diantara sesamanya dalam penerapan *good governance*. Pada tahun 2008 seminar diselenggarakan 6 kali, sesuai target. Jumlah peserta terus mengalami peningkatan. Kualitas dan efektivitas komunikasi antar inspektorat dan unit kerja terus diperbaiki. Tema seminar disusun lebih *friendly*, menjawab kebutuhan publik Bappenas. Seminar juga melakukan jejak pendapat atas kualifikasi pembicara dan penyelenggaraan. *Need assessment* ini memandu perbaikan kinerja seminar secara berkelanjutan.

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama. Kendala pertama adalah lemahnya Lingkungan Pengendalian (*control environment*). Kelemahan ini terlihat dari kurangnya komitmen pimpinan unit kerja dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Lingkungan pengendalian juga belum optimal karena belum adanya *reward and punishment* yang jelas. Disamping itu kendala dalam lingkungan pengendalian adalah masih adanya anggapan kegiatan administrasi sebagai kegiatan yang kurang penting dibanding kegiatan substantif.

Kendala berikutnya adalah belum dipahaminya manajemen resiko yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi diterbitkannya PP 60 Thn 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP). Kendala ketiga adalah tidak optimalnya aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk

mengantisipasi risiko kegagalan pencapaian tujuan. Sebagai contoh kelemahan ini adalah belum tersedianya kriteria yang baku terkait dengan pengukuran keberhasilan sebuah unit kerja, belum sempurnanya ketentuan pengelolaan anggaran dan struktur organisasi pengelolaan anggaran yang memisahkan antara PPK sebagai penanggung jawab administrasi pengelolaan anggaran dan unit kerja.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, selain meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi *assurance* dan *consulting*, juga telah dirancang langkah-langkah antisipatif yang diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan di tahun 2008. Langkah ini dilaksanakan melalui:

- a. Mengoptimalkan kegiatan seminar ketaatan sebagai upaya memperbaiki lingkungan pengendalian.
- b. Melakukan workshop *Control Self Assessment* dan memfasilitasi penerapan manajemen resiko pada setiap unit kerja
- c. Menyusun kriteria pengawasan manajemen tupoksi kelembagaan dan pengelolaan anggaran di tahun 2008
- d. Pengajuan usulan perbaikan ketentuan pengelolaan anggaran dan tupoksi kelembagaan.
- e. Mengajukan masukan penyempurnaan aturan pengelolaan anggaran ke departemen terkait.
- f. Menyusun pedoman PPK yang berisi hubungan kerja antara pelaksana kegiatan dan PPK.

E.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran Program PPAAN terdapat sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kelembagaan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ditetapkan indikator sebagaimana tampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 36 PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2008 PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOMES	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal	40 %	30 %	75 %
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	75 %

1. Pengurangan temuan oleh lembaga eksternal

Pada tahun 2008, pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal baru terealisasi mencapai sebesar 75% dari targetnya sebesar 40%. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan temuan-temuan merupakan temuan yang tersebar di sejumlah daerah yang terisolir. Bila dikonversi dalam rupiah maka penurunan 75% adalah merupakan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebesar Rp.518 juta

2. Tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan

Untuk meningkatkan kualitas opini laporan keuangan, sudah ditargetkan opini yang akan dicapai adalah wajar tanpa pengecualian. Dibandingkan dengan target tersebut, realisasi yang dicapai hanya opini wajar dengan pengecualian. Namun demikian dibandingkan dengan tahun lalu, opini laporan keuangan yang dicapai pada tahun 2008 secara kualitas terjadi peningkatan dengan berkurangnya catatan yang dikualifikasi. Pada tahun 2007, catatan BPK atas laporan keuangan berkenaan dengan aset dan hibah, sedang pada tahun 2008 catatan berkurang hanya untuk masalah aset. Untuk pengelolaan PHLN di Kementerian Negara PPN/Bappenas sudah diselesaikan rancangan final Peraturan Meneg PPN/Kepala Bappenas mengenai Pengelolaan PHLN di Kementerian Negara PPN/Bappenas. Diharapkan, Permen tersebut sudah ditetapkan pada awal tahun 2009.

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2008, Kementerian Negara PPN/Bappenas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 601,374 miliar yang terdiri dari sebesar Rp. 331,652 miliar untuk rupiah murni (55%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 269,721 (45%). Dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 601,374 dibagi kedalam beberapa program dan telah direalisasikan, yaitu

1. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 291,079 yang terdiri dari Rp. 154,386 miliar (53,04%) untuk rupiah murni dan untuk PHLN sebesar Rp. 136,693 miliar (46,96%). Sedangkan realisasi anggaran untuk Program

kelembagaan dan ketatalaksanaan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 148,241 miliar (60,93%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 133,030 miliar (90%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 15,211 miliar (10%).

2. Program pengelolaan SDM aparatur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 107,926 yang terdiri dari Rp. 35,017 miliar (32,45%) untuk rupiah murni dan untuk PHLN sebesar Rp. 72,908 miliar (67,55%). Sedangkan realisasi anggaran untuk pengelolaan SDM aparatur pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 89,101 241 miliar (60,93%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 18,138 miliar (20%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 70,962 miliar (80%).
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 27,479 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 21,538 miliar (60,93%)
4. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik. mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 63,801 miliar, Sedangkan realisasi anggaran untuk Program kelembagaan dan ketatalaksanaan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 50,224%.
5. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3,500 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3,276 miliar.
6. Program lainnya (program pemberdayaan masyarakat dan program pembiayaan lain-lain) mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 107,586 miliar terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 47,466 miliar dan PHLN sebesar 60,199 miliar. Sedangkan realisasi anggaran untuk Program lainnya (program pemberdayaan masyarakat dan program pembiayaan lain-lain) adalah sebesar Rp. 67,016 miliar (62,29%) yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 43,052 miliar (64%) dan untuk PHLN sebesar Rp. 23,791 miliar (36%).

Sesungguhnya anggaran sebesar Rp. 601,374 miliar terdiri dari anggaran 55 dan 69 (Depkeu), tidak seluruhnya untuk membiayai kegiatan tupoksi Kementerian Negara PPN/Bappenas. Sekitar 40% dari Rp. 601,374 miliar tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain (non perencanaan, dsbnya) antara lain sesuai penugasan Presiden sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam Bab II.

Tabel 39
Rekapitulasi Realisasi Penyerapan Anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas
Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 2008

No	Rincian	PENYEDIAAN DANA				REALISASI PELAKSANAAN DANA					
		Rupiah Murni	No. NPPHLN	PHLN	Jumlah	Rupiah Murni	%	PHLN	%	Jumlah	%
1	2	3	4	4	5=3+4	6	7=6/3	8	9=8/4	10=6+8	11=10/5
A	ANGGARAN 55	284,185,556,000		209,602,104,000	493,787,660,000	226,208,299,576	79.60	86,173,874,489	41.11	312,382,174,065	63.26
I	PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	63,801,957,000			63,801,957,000	50,224,408,553	78.72	-	-	50,224,408,553	78.72
1	PPK PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK	63,801,957,000			63,801,957,000	50,224,408,553	78.72			50,224,408,553	78.72
II	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	3,500,020,000			3,500,020,000	3,276,443,313	93.61	-	-	3,276,443,313	93.61
2	PPK INSPEKTORAT UTAMA	3,500,020,000			3,500,020,000	3,276,443,313	93.61			3,276,443,313	93.61
III	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	154,386,379,000		136,693,498,000	291,079,877,000	133,030,495,075	86.17	15,211,291,459	11.13	148,241,786,534	50.93
3	PPK I SESMENEK PPN/SESTAMA BAPPENAS	33,948,096,000		9,190,225,000	43,138,321,000	23,778,909,716	70.04	-	-	23,778,909,716	55.12
4	PPK II SESMENEK PPN/SESTAMA BAPPENAS	29,308,628,000			29,308,628,000	25,685,732,712	87.64			25,685,732,712	87.64
5	PPK DEPUTI BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN	8,700,223,000		1,233,725,000	9,933,948,000	7,989,432,445	91.83		-	7,989,432,445	80.43
6	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK PERTAHANAN DAN KEAMANAN	11,394,546,000		5,415,282,000	16,809,828,000	10,104,338,692	88.68	2,991,349,990	55.24	13,095,688,682	77.90
7	PPK DEPUTI BIDANG OTDA DAN PENGEMBANGAN REGIONAL	16,034,979,000		92,874,250,000	108,909,229,000	15,139,677,202	94.42	1,254,711,064	1.35	16,394,388,266	15.05
8	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	7,666,015,000			7,666,015,000	7,216,814,418	94.14			7,216,814,418	94.14
9	PPK DEPUTI BIDANG SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP	9,241,972,000			9,241,972,000	8,485,418,554	91.81			8,485,418,554	91.81
10	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASANA	7,514,082,000		4,845,000,000	12,359,082,000	6,809,692,893	90.63		-	6,809,692,893	55.10
11	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	9,890,766,000		4,962,740,000	14,853,506,000	9,023,232,656	91.23	1,046,316,175	21.08	10,069,548,831	67.79
12	PPK DEPUTI KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN DAN UKM	7,772,387,000		5,238,179,000	13,010,566,000	6,842,268,490	88.03	1,102,218,330	21.04	7,944,486,820	61.06
13	PPK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU	3,209,686,000		12,934,097,000	16,143,783,000	2,414,451,936	75.22	8,816,695,900	68.17	11,231,147,836	69.57
14	PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	9,704,999,000			9,704,999,000	9,540,525,361	98.31			9,540,525,361	98.31
IV	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	35,017,464,000		72,908,606,000	107,926,070,000	18,138,620,418	51.80	70,962,583,030	97.33	89,101,203,448	82.56
15	PPK PROGRAM PENGELOLAAN SDM APARATUR	35,017,464,000		72,908,606,000	107,926,070,000	18,138,620,418	51.80	70,962,583,030	97.33	89,101,203,448	82.56
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	27,479,736,000			27,479,736,000	21,538,332,217	78.38	-	-	21,538,332,217	78.38
16	PPK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	27,479,736,000			27,479,736,000	21,538,332,217	78.38			21,538,332,217	78.38
B	ANGGARAN 69	47,467,147,000		60,119,713,000	107,586,860,000	43,051,641,412	90.70	23,791,984,758	39.57	67,016,786,670	62.29
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	18,894,696,000		60,119,713,000	79,014,409,000	17,091,235,062	90.46	23,791,984,758	39.57	40,883,219,820	51.74
17	PPK PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH	5,394,999,000		22,000,000,000	27,394,999,000	5,051,940,671	93.64	8,204,066,829	37.29	13,256,007,500	48.39
18	PPK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH	4,999,697,000		6,880,000,000	11,879,697,000	4,385,428,641	87.71	5,701,432,797	82.87	10,086,861,438	84.91
19	PPK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	8,500,000,000		31,239,713,000	39,739,713,000	7,653,865,750	90.05	9,886,485,132	31.65	17,540,350,882	44.14
VII	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	28,572,451,000		-	28,572,451,000	25,960,406,350	90.86	-	-	26,133,566,850	91.46
20	PPK PROGRAM PENERAPAN KEPERINTAHAN YANG BAIK (TKPKN)	27,217,526,000			27,217,526,000	25,239,681,350	92.73			25,239,681,350	92.73
21	KEGIATAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN BLT (EKP)	1,354,925,000			1,354,925,000	720,725,000				893,885,500	65.97
	JUMLAH	331,652,703,000		269,721,817,000	601,374,520,000	269,259,940,988	81.19	109,965,859,247	40.77	379,398,960,735	63.09

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran tahun 2008 sesuai tugas pokok dan fungsi telah diuraikan dalam Bab III tentang Akuntabilitas Kinerja. Keberhasilan tersebut diukur dari pencapaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Bab II tentang Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2008. Rencana Kinerja Tahun 2008 merupakan bagian dari Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas periode 2005-2009.

Sesuai dengan tugasnya, Kementerian Negara PPN/Bappenas mempunyai tugas utama yang menyiapkan dan mengkoordinasi penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Dalam melakukan tugas tersebut Kementerian Negara PPN/Bappenas senantiasa berupaya melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pada instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat maupun pelaku usaha swasta. Penetapan target-target dalam rencana pembangunan nasional tersebut dilakukan melalui suatu proses partisipatif para pemangku kepentingan, dengan mekanisme proses perencanaan dari tingkat bawah (*bottom up planning*) dan proses perencanaan dari atas (*top down planning*).

Keluaran atau *output* dari penyusunan rencana tersebut adalah rancangan rencana pembangunan nasional, yang kemudian dibahas sesuai peraturan yang berlaku dan ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan (RKP). Penetapan tersebut merupakan hasil (*outcome*) dari keluaran di atas. Selanjutnya, seluruh dokumen rencana pembangunan nasional tersebut menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam menyusun rencana program dan kegiatan di instansinya masing-masing. Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan di atas, merupakan dampak (*impact*) dari keluaran kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Selain tugas utama dalam perencanaan pembanguana nasional, pada kenyataannya Kementerian Negara PPN/Bappenas menerima banyak penugasan Presiden baik yang bersifat sektoral/bidang, daerah/wilayah, maupun yang bersifat lintas sektoral/bidang dan lintas

daerah/wilayah. Umumnya, tugas-tugas tambahan tersebut bersifat koordinasi strategis dan tidak jarang yang bersifat mendesak sehingga harus segera diselesaikan. Misalnya, penugasan untuk pembentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LJKPP), koordinasi penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh dan Nias sebagai persiapan berakhirnya Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) pada April 2009, koordinasi penanganan perubahan iklim (*climate change*), serta koordinasi kegiatan reformasi audit (*state audit reform-sectoral development project*, STAR SDP). Semua penugasan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dinilai memiliki kompetensi, dan kredibilitas menangani tugas-tugas strategis.

Disadari, walaupun pada umumnya kegiatan berhasil dilaksanakan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, namun hal itu bukan berarti tidak menghadapi hambatan. Cukup banyak permasalahan atau hambatan pokok yang harus diselesaikan, antara lain:

- 1) Rencana pembangunan (khususnya RKP) yang telah ditetapkan seringkali menghadapi perubahan lingkungan strategis, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan krisis keuangan global, dan perubahan atau dinamika ekonomi global lainnya. Konsekuensinya, perlu dilakukan penyesuaian target-target dalam dokumen rencana pembangunan (RPJM dan RKP). Misalnya, pada tahun 2008 terjadi kenaikan harga BBM sehingga mengakibatkan alokasi anggaran K/L yang telah ditetapkan harus disesuaikan kembali (direvisi, pengurangan 10%) dengan kondisi keuangan negara pada saat itu.
- 2) Masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan pemerintah melalui APBN dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJP, RPJM dan RKP.
- 3) Masih belum selesainya pedoman reformasi birokrasi yang solid dan komprehensif sehingga belum dapat dijadikan acuan sepenuhnya dalam pengembangan manajemen kinerja di Kementerian Negara PPN/Bappenas.

Melihat permasalahan atau hambatan pokok tersebut di atas, Kementerian Negara PPN/Bappenas telah melakukan berbagai langkah strategis untuk mengatasinya, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan terus peran Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan termasuk penentuan sasaran atau target-target yang lebih realistis, dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional.
- 2) Mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta didalam pembiayaan pembangunan antara lain untuk kelompok barang-barang publik (*public goods*) yang memerlukan investasi besar khususnya dalam pembangunan infrastruktur berskala besar. Hal tersebut sudah dilakukan antara pemerintah dan swasta dengan menyusun rencana usulan pembangunan infrastruktur berskala besar yang di terbitkan melalui *Public Private Partnersip* (PPP) Book, serta penyusunan konsep kebijakan PPP dan membentuk komite kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur (KKPPI).
- 3) Terus melakukan peningkatan kompetensi SDM Kementerian Negara PPN/Bappenas agar dapat cepat tanggap dalam memprediksi atau mendeteksi dini (*early warning system*) perubahan lingkungan strategis nasional dan internasional agar segera mengambil langkah-langkah antisipatif.
- 4) Kementerian Negara PPN/Bappenas terus melanjutkan reformasi birokrasi dengan fokus pada pengembangan manajemen kinerja sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

---- 000 ----

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2005 – 2009**

INSTANSI : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 VISI : Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara
 MISI : 1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
 2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional
 3. Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya
 4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditindaklanjuti dengan memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam proses pengambilan kebijakan Pembangunan Nasional sesuai agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional - Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan perencanaan pembangunan nasional - Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong peningkatan kualitas perencanaan termasuk kualitas hasil pemantauan, dan evaluasi program pembangunan melalui analisis kebijakan, pengkajian, dan perumusan prakarsa strategis di bidang perencanaan pembangunan yang bersifat multi dimensi - Peningkatan kualitas pembangunan di tingkat pusat, daerah dan nasional untuk mewujudkan integrasi lintas sector pembangunan dan fungsi kelembagaan, khususnya sinkronisasi dan sinergi antara program pembangunan dan anggaran pembangunan - Pengembangan proses partisipatif dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta penerapan sistem keterbukaan informasi tentang rencana dan hasil-hasil pembangunan kepada stakeholder dan masyarakat - Pemantapan posisi perencanaan dalam proses penyusunan RAPBN, pengelolaan PHLN, sinkronisasi kebijakan public, serta monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya - Penataan organisasi Bappenas sesuai dengan kompetensi lembaga serta pengembangan mekanisme kerja, penerapan sistem manajemen organisasi dan akuntabilitas kinerja secara konsisten pada semua jajaran guna mendukung pelaksanaan peran pengambilan keputusan, <i>think tank</i>, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan 	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	

**RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2005 – 2009**

INSTANSI : Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 VISI : Menjadi institusi perencana yang handal, kredibel dan secara proaktif ikut berperan dalam penentuan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara
 MISI : 1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
 2. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional
 3. Mewujudkan institusi perencana sebagai mitra dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan nasional lainnya
 4. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan

TUJUAN (1)	SASARAN		CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN (6)
	URAIAN (2)	INDIKATOR (3)	KEBIJAKAN (4)	PROGRAM (5)	
2. Memantapkan peran dan keikutsertaan Bappenas dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan nasional dan menjadi organisasi yang handal dalam perencanaan pembangunan yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam rangka menjamin tujuan bernegara.	- Meningkatkan potensi dan kompetensi sumber daya manusia disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional	- Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur di Kementerian Negara PPN/Bappenas - Persentase peningkatan kompetensi sumber daya manusia perencana di instansi lainnya, pusat, dan daerah	Peningkatan kemampuan teknis dan strategis lembaga dan SDM perencana tingkat pusat dan daerah baik dalam domain of expertise (hardskills maupun domain of competencies (soft skills)	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	
	- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang mengikuti teknologi yang mutakhir, berkualitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sumber daya manusia perencana - Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	- Persentase peningkatan kualitas pengelolaan aset fasilitas kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas	Meningkatkan akses dan penguasaan data/informasi statistic, hasil-hasil litbang, pada wilayah dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional	Peningkatan Sarana dan Aparatur Negara	
	- Meningkatkan kualitas pelayanan umum	- Persentase peningkatan pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas - Persentase kualitas pembinaan pengelolaan anggaran Kementerian Negara PPN/Bappenas	Penataan organisasi Bappenas sebagai "organization capital" yang melalui pengembangan budaya organisasi, yang dijabarkan dalam nilai inti budaya, serta kode etik profesi perencana pembangunan	Penerapan Pemerintahan Yang Baik	
	- Meyelenggarakan pengawasan aparatur dalam menunjang peran-peran pengambilan keputusan, think tank, koordinator, dan administrator perencanaan pembangunan	- Berkurangnya temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal - Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pengawasan dan audit yang teratur disertai dengan penegakkan peraturan yang berlaku secara bertahap untuk mewujudkan akuntabilitas aparatur	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional antara lain berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) RKP (2009) 2) konsep awal/ sementara mengenai garis – garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun dan dilanjutkan pada tahun 2009) - Jumlah <i>Background Studies</i> untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Atelaahan dan Kajian Bidang Pembangunan (berbagai bidang/ sektor, sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014) - Jumlah kajian strategis lainnya untuk penyusunan usulan kebijakan dokumen kajian-kajian berbagai bidang yang ditujukan sebagai bahan penyusunan usulan kebijakan 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<p>Kegiatan Kajian meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, Hukum dan Reformasi Birokrasi, Revitalisasi Perdesaan, Pertanian dan Agro Industri, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Mitigasi dan Penanggulangan Bencana Alam, serta Tata Ruang dan Kemaritiman - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan <p>Kegiatan Evaluasi meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan <p>Kegiatan Koordinasi meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Kajian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional - Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan nasional melalui produk kajian dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional 	<p>dokumen</p> <p>persentase</p>	<p>1</p> <p>100</p>
						- Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional	dokumen	1
						- Terkoordinasinya kegiatan perencanaan pembangunan nasional dengan instansi di pusat dan daerah	persentase	100

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (Sidang Kabinet, Rakor setiap bidang/sector, Rakorpus, Musrenbangprop, Musrenbangnas, Trilateral Meeting, RDP dengan DPR, dan sebagainya) 	1 dokumen		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional: 1) per bidang/sector 2) lintas bidang/sector 3) pembangunan daerah 	1 dokumen		Kegiatan Pemantauan meliputi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kegiatan Pemantauan atas Pelaksanaan rencana Pembangunan - Terlaksananya monitoring atas pelaksanaan rencana program-program pembangunan 	dokumen persentase	1 100
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2009) berikut anggarannya. (Penetapan oleh Presiden dan DPR) 	1 dokumen		Kegiatan Penyusunan Basis Data meliputi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Basis Data - Tersusunnya pemutakhiran data dan informasi (basis data) sektoral, regional, dan makro dalam cetak dan elektronik 	dokumen persentase	1 100
		<ul style="list-style-type: none"> - % rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2009 dan konsep RPJMN 2010-2014 	100%					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi State Audit Reform Sectoral Development Program/Project (STAR-SDP) b. Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>) c. Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i> d. Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah. e. Koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN. f. Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat g. Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen 					

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		h. Koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 dokumen					
		i. Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen					
		j. Koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	1 dokumen					
		k. Koordinasi penataan ruang	1 dokumen					
		l. Koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen					
		m. Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen					
		n. Pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	1 dokumen					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		o. % peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden	90 %					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM disertai dengan peningkatan instrumen, fasilitas perencanaan, pemanfaatan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi, data dan informasi yang akurat dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri - Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP - Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia - Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan : <ul style="list-style-type: none"> - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan - % alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3. - % alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah. 	<p>457 orang</p> <p>1460 orang</p> <p>7 dokumen</p> <p>39 orang</p> <p>625 orang</p> <p>59 orang</p> <p>40 orang</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p>	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana - Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana 	<p>dokumen</p> <p>persentase</p>	<p>1</p> <p>100</p>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- % alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %					
		- % alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %					
		- % perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %					
		- % pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %					
		- % penilaian pejabat eselon I dan II yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	- % peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	90 %	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	- Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan - Terselenggaranya koordinasi dalam rangka mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur negara	dokumen	1
		- % peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	70 %				persentase	100
	- Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	- % Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %					
		- % sarana dan prasarana serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang terlaksana dengan baik	70%					
		- Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas - Persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas 	<p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">90 %</p>	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Terselenggaranya koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 	<p style="text-align: center;">dokumen</p> <p style="text-align: center;">persentase</p>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">100</p>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008. - Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan. - Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen - Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan. - Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB - Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan - Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal 	<p>8 LHP</p> <p>40%</p> <p>4 Masukan</p> <p>6 buah</p> <p>4 Lap</p> <p>6 Kali</p> <p>40 %</p>	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan, Tindak Lanjut Temuan, dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut temuan, dan sistem informasi hasil pengawasan - Terselenggaranya kegiatan koordinasi dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut temuan, dan sistem informasi hasil pengawasan 	<p>dokumen</p> <p>persentase</p>	<p>1</p> <p>100</p>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian					

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN			RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional antara lain berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1) RKP (2009) 2) konsep awal/semntara mengenai garis –garis besar rancangan awal RPJMN 2010-2014 (disusun pada akhir tahun,dan dilanjutkan pada tahun 2009) - Jumlah <i>Background Studies</i> untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Atelaahan dan Kajian Bidang Pembangunan (berbagai bidang/sector, sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan RPJM 2010-2014) - Jumlah kajian strategis lainnya untuk penyusunan usulan kebijakan dokumen kajian-kajian berbagai bidang yang ditujukan sebagai bahan penyusunan usulan kebijakan - Jumlah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional (Sidang Kabinet, Rakor setiap bidang/sector, Rakorpus, Musrenbangprop, Musrenbangnas, Trilateral <i>Meeting</i>, RDP dengan DPR, dan sebagainya) - Jumlah Laporan Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional: <ul style="list-style-type: none"> 1) per bidang/sector 2) lintas bidang/sector 3) pembangunan daerah - Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2009) berikut anggarannya. (Penetapan oleh Presiden dan DPR) 	<ul style="list-style-type: none"> 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> - % rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2009 dan konsep RPJMN 2010-2014 	100%	Rp 291.079.660.000,-

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi State Audit Reform Sectoral Development Program/Project (STAR-SDP) - Koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>) - Koordinasi pengembangan <i>good governance</i> melalui sosialisasi dan pengembangan <i>Good Governance Index</i> - Koordinasi program RAN PK di tingkat pusat dan daerah. - Koordinasi penyusunan Jakarta Commitment dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN. - Koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat - Koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>) - Koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah - Koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009 - Koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008 - Koordinasi penataan ruang - Koordinasi peningkatan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana alam 	<p>1 dokumen</p>	% peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden	90 %	

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK) - Pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas 	<p>1 dokumen</p> <p>1 dokumen</p>			

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di pusat dan di daerah.	- Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri - Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP - Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia	457 orang 1460 orang 7 dokumen	- Persentase alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3. - Persentase alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah. - Persentase alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana. - Persentase alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi. - Persentase perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 % 80 % 80 % 80 % 80 %	Rp 107.926.070.000,-
	- Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas.	Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan : - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan	39 orang 625 orang 59 orang 40 orang	- Persentase pegawai merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas. - Persentase penilaian pejabat eselon I dan II Kementerian Negara PPN/Bappenas yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 % 80 %	

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	- Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	90 %	- Persentase sarana dan prasaran serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang terlaksana dengan baik	70%	Rp 27.479.736.000,-
	- Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	- Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan - Persentase Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 % 70 %	- Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik	

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerapan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai - Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas 	90 %	Rp 63.801.957.000,-

**PENETAPAN KINERJA
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		ANGGARAN
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008. - Persentase tindaklanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan. - Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen - Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan. - Jumlah laporan reviu atas laporan keuangan, lakip dan tor/rab - Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan 	<p>8 lhp</p> <p>40%</p> <p>4 masukan</p> <p>6 buah</p> <p>4 laporan</p> <p>6 kali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal - Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan 	<p>40 %</p> <p>Wajar tanpa pengecualian</p>	Rp.3.500.020.000,-

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATROR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Meningkatnya kualitas proses perencanaan dan dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan baik secara substantif maupun penganggaran nasional	- Jumlah Dokumen Pengkajian Bidang Pembangunan	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	100 %		
		- Dokumen <i>Background study</i> untuk penyusunan Rancangan Kebijakan/ elaaahan dan kajian bidang pem-bangunan (berbagai bidang/sector sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RPJM 2010-2014	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	1 dokumen berisi berbagai sector/bidang pembangunan	100 %		
		- Dokumen kajian pembangunan baik isu strategis dan prakarsa strategis baik bersifat sektoral/bidang, lintas bidang/sektoral maupun daerah/ wilayah dan lintas wilayah.					
		Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan nasional dan pendanaan, meliputi :					
		- Dokumen koordinasi perencanaan pembangunan tingkat pusat (Rakorpus)	1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		- Dokumen musyawarah perencanaan pembangunan baik nasional dan propinsi	1 dokumen	1 dokumen	100 %		
		Jumlah laporan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, meliputi :					
		- Dokumen evaluasi 3 tahun pelaksanaan RPJM 2005-2009 - Laporan evaluasi RKP 2008	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100 % 100 %		
Dokumen koordinasi strategis sesuai penugasan Presiden/Pemerintah, antara lain:							
- Dokumen koordinasi <i>State Audit Reform Sectoral Development Program/ Project</i> (STAR SDP)	1 dokumen	1 dokumen	100 %				
- Dokumen koordinasi persiapan kebijakan kerjasama pemerintah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %				
- Dokumen sosialisasi <i>good governance</i> dan pengembangan <i>Good Governance Index</i>	1 dokumen	1 dokumen	100 %				
- Dokumen Koordinasi dan sosilisasi pelaksanaan RAN PK di pusat dan daerah.	1 dokumen	1 dokumen	100 %				

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Dokumen koordinasi penyusunan Jakarta <i>Commitment</i> dengan donor (bilateral dan multilateral) untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan PHLN.	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi program nasional pemberdayaan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi penanganan perubahan iklim (<i>climate change</i>)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi pembentukan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi pengelolaan bantuan (<i>grant</i>) dari donor (multilateral dan bilateral) untuk Pemilu 2009	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi penyusunan buku Pegangan (<i>handbook</i>) penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2008	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi penataan ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen koordinasi peningkatan upaya mit-gasi dan pengurangan resiko bencana alam	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen kebijakan prioritas Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dokumen	1 dokumen	100 %	
		- Dokumen pengembangan manajemen di Kementerian Negara PPN/Bappenas	1 dokumen	1 dokumen	100 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATROR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Presiden	Persentase rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang menjadi kebijakan antara lain RKP 2009 dan konsep RPJMN 2010-2014	100 %	80 %	100 %	
		Persentase peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dari Presiden	90 %	80 %	100 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia perencana dan kapasitas instansi perencanaan di instansi lainnya, pusat dan di daerah.	Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan gelar di dalam negeri dan di luar negeri	457 orang	383 orang	83.81 %	
		Jumlah peserta yang selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan non gelar baik teknis/substantif maupun non gelar penjenjangan JFP	1460 orang	1249 orang	85.84 %	
		Jumlah dokumen yang mengatur pelaksanaan jabatan fungsional perencana di seluruh Indonesia	7 dokumen	7 dokumen	100 %	
		Persentase alumni yang memperoleh penempatan kembali sesuai dengan latar belakang studi S2/S3.	80 %	0 %	0 %	
		Persentase alumni yang diikutsertakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan nasional/daerah.	80 %	0 %	0 %	
		Persentase alumni diklat non gelar substantif yang dinilai mampu melakukan aplikasi pengetahuan hasil diklat ke dalam proses penyusunan rencana.	80 %	0 %	0 %	
		Persentase alumni diklat non gelar penjenjangan fungsional perencana yang telah diangkat ke dalam atau naik ke jenjang jabatan perencana yang lebih tinggi.	80 %	0 %	0 %	
		Persentase perencana (JFP) memahami dokumen peraturan dan mendorong efektifitas pelaksanaan tugas serta pengumpulan angka kreditnya.	80 %	0 %	0 %	
	Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi pegawai Kementerian Negara PPN/ Bappenas.	Jumlah pegawai Kementerian Neaga PPN/Bappenas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan : - Diklat Pimpinan - Diklat Teknis - Diklat Fungsional - Diklat Prajabatan	39 orang 625 orang 59 orang 40 orang	11 orang 550 orang 18 orang 36 orang	28.21 % 88 % 30.50 % 90 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Persentase pegawai Kementerian Negara PPN/Bappenas merasakan relevansi yang positif antara diklat pegawai dengan peningkatan kompetensi pegawai Bappenas.	80 %	0 %	0 %	
		Persentase penilaian pejabat eselon I dan II Kementerian Negara PPN/Bappenas yang menyatakan terjadi peningkatan kompetensi pegawai yang telah mengikuti diklat.	80 %	0 %	0 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas dan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai	Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan fasilitas kerja dan aset Kementerian Negara PPN/ Bappenas	70 %	90 %	129 %	
		Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	1 Dokumen	1 dokumen	100 %	
		Persentase Kelengkapan data/informasi yang diperlukan	70 %	50%	72 %	
	Kecepatan dalam mengakses data/informasi mutakhir	Persentase sarana dan prasaran serta fasilitas kerja pendukung lainnya yang tersedia dengan baik	70%	45 %	80 %	
		Waktu yang digunakan untuk mengakses data/informasi mutakhir	5 detik	60 detik	12.5 %	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATROR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penerapan Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan umum	Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	100 %	90%	90%	
		Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan pelayanan umum lainnya untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai	100 %	100%	100%	
		Persentase peningkatan kualitas manajemen atau pengelolaan keuangan negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas	100 %	75%	93%	
		Persentase peningkatan kualitas pelayanan umum di Kementerian Negara PPN/Bappenas	90 %	85%	85%	

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM UTAMA	SASARAN	INDIKATROR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI	PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan keuangan dan kinerja tupoksi kelembagaan yang dihasilkan pada tahun 2008.	8 LHP	8 LHP	100 %	
		Persentase tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan keuangan dan pelaksanaan tupoksi kelembagaan.	40%	30%	75 %	
		Jumlah masukan pengembangan atau penyempurnaan sistem pengendalian manajemen	4 masukan	8 masukan	100 %	
		Jumlah peraturan yang bermasalah dalam pengelolaan anggaran dan pengelolaan tupoksi kelembagaan.	6 buah	6 buah	100 %	
		Jumlah Laporan Reviu atas laporan keuangan, LAKIP dan TOR/RAB	4 laporan	4 laporan	100 %	
		Jumlah seminar ketaatan yang dilaksanakan	6 kali	6 kali	100%	
		Pengurangan temuan oleh lembaga pemeriksaan eksternal	40 %	30 %	75 %	
		Meningkatnya kualitas opini laporan keuangan	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	75 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	<p>Kegiatan Kajian meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, Hukum dan Reformasi Birokrasi, Revitaliasasi Perdesaan, Pertanian dan Agro Industri, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Mitigasi dan Penganggulangan Bencana Alam, serta Tata Ruang dan Kemaritiman - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan <p>Kegiatan Evaluasi meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Kajian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional - Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas perencanaan pembangunan nasional melalui produk kajian dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional 	<p>dokumen</p> <p>persentase</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	
		<p>Kegiatan Koordinasi meliputi Bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional - Terkoordinasinya kegiatan perencanaan pembangunan nasional dengan instansi di pusat dan daerah 	<p>dokumen</p> <p>persentase</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>1</p> <p>100</p>	<p>100 %</p> <p>100 %</p>	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		<ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 						
		Kegiatan Pemantauan meliputi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Kegiatan Pemantauan atas Pelaksanaan rencana Pembangunan - Terlaksananya monitoring atas pelaksanaan rencana program-program pembangunan 	dokumen persentase	1 100	1 100	100 % 100 %	
		Kegiatan Penyusunan Basia Data meliputi Bidang : <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen, - Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, - Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, - Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah - Ekonomi - Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - Sarana dan Prasarana - Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah - Pendanaan Pembangunan - Evaluasi Kinerja Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Basis Data - Tersusunnya pemutakhiran data dan informasi (basis data) sektoral, regional, dan makro dalam cetak dan elektronik 	dokumen persentase	1 100	1 100	100 % 100 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana - Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pendidikan, Pembinaan, dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencana 	dokumen	1	1	100 %	
				persentase	100	100	100 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Proses Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan - Terselenggaranya koordinasi dalam rangka mendukung proses pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana aparatur negara 	dokumen	1	1	100 %	
				persentase	100	100	100 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Terselenggaranya koordinasi dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 	dokumen	1	1	100 %	
				persentase	100	100	100 %	

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
TAHUN 2008**

INSTANSI : KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN					PERSENTASE PENCAPAIAN RENCANA TINGKAT CAPAIAN	KETERANGAN
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	Kegiatan Koordinasi dalam rangka Meningkatkan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan, Tindak Lanjut Temuan, dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dokumen kegiatan dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut temuan, dan sistem informasi hasil pengawasan - Terselenggaranya kegiatan koordinasi dalam rangka kegiatan pelaksanaan pengawasan, tindaklanjut temuan, dan sistem informasi hasil pengawasan 	dokumen	1	1	100 %	
				persentase	100	100	100 %	